



Keputusan Wali Kota
No. 000.7.2 / 273 / 2026

Lampiran XXVII

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2027



DINAS PERINDUSTRIAN
DAN TENAGA KERJA

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA TAHUN LALU.....	6
2.1 Evaluasi Capaian Kinerja.....	6
2.2 Evaluasi Capaian SPM	16
2.3 Permasalahan dan Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.....	16
2.4 Pokok – pokok pikiran DPRD.....	19
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	19
2.6 Inovasi bidang urusan dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat	20
BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA.....	22
3.1 Tujuan dan Sasaran Renja.....	22
3.2 Arah Kebijakan	24
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	31
4.1 Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	31
4.1 Tematik	39
BAB V KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	45
5.1 Indikator Kinerja Utama Tahun 2027	45
5.2 Indikator Kinerja Kunci Tahun 2027	46
BAB VI PENUTUP.....	49

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga Tahun 2027 telah dapat tersusun, sebagai salah satu persyaratan untuk mendukung pencapaian pembangunan dalam rangka mewujudkan pemerintah yang baik dan bersih (Good Governance and Clean Government).

Penyusunan Rencana Kerja dilakukan sebagai persiapan penyusunan rencana kerja yang merupakan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri No.86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja untuk mengetahui dan mengukur tingkat kinerja yang akan dilaksanakan selama periode 1 (satu) tahun dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis segala pelaksanaan kebijakan, program maupun kegiatan operasional sebagaimana telah disusun dalam Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga Tahun 2025-2029.

Dengan dibuatnya rencana kerja terhadap pelaksanaan kegiatan, program dan kebijakan yang berdasarkan Visi dan Misi Walikota Salatiga sebagaimana tercantum dalam RPD Kota Salatiga 2023 – 2026, akan dapat memberikan gambaran sejauh mana tingkat efektifitas dan efesiensi dapat dijadikan sebagai bahan kajian untuk menetapkan segala kegiatan, program dan kebijakan agar tepat sasaran serta berdaya guna dalam melaksanakan pembangunan di bidang perindustrian dan ketenagakerjaan di Kota Salatiga.

Dalam penyusunan Rencana Kerja 2027 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga ini masih terdapat kekurangan untuk itu masukan, kritik dan saran sangat kami harapkan untuk perbaikan penyusunan rencana kerja pada tahun mendatang.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 diatur bahwa dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Berdasarkan ketentuan pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 126 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menyebutkan bahwa perangkat daerah menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga dibentuk Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 124 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang perindustrian, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Untuk merealisasikan tugas tersebut diperlukan Renja Perangkat Daerah sebagai persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah yang merupakan Dokumen Perencanaan yang berisi uraian secara rinci mengenai berbagai kebijakan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran

Rencana Strategis Tahun 2025-2029. Penyusunan rencana kerja diarahkan untuk mencapai Misi Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2025-2045 yaitu *“Mewujudkan Perekonomian yang Berdaya Saing melalui Pengembangan Sektor Unggulan yang Berkelanjutan”* yang ditandai dengan meningkatnya PDRB Kota, kesempatan berusaha, optimalisasi potensi ekonomi local, penciptaan lapangan kerja baru, kapasitas tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri dan pasar kerja untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program dan Kegiatan yang tersusun dalam rencana kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga merupakan acuan kerja Pembangunan yang ingin dicapai pada Tahun 2027.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 79 tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak- Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Salatiga;
 11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2023-2043 ;
 12. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2025-2045;
 13. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga Tahun 2025-2029;
 14. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 124 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
 15. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2026 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027;

1.3. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

A. MAKSUD :

- a. Menyediakan satu Pedoman Pelaksanaan Pembangunan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan dalam rangka mencapai Tujuan dan Sasaran Strategis sebagai persiapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- b. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara Perencanaan Jangka Menengah dan Program Kerja Tahunan.
- c. Menyiapkan semua faktor yang mendukung keberhasilan Pencapaian Tujuan Organisasi serta meminimalkan permasalahan yang dimiliki.

B. TUJUAN :

- a. Sebagai langkah awal dalam melakukan pengukuran kinerja dan dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. Tersedianya dokumen perencanaan yang dapat dijadikan pedoman dan menentukan arah kegiatan dalam jangka waktu 1 tahun;
- c. Sebagai acuan yang dapat digunakan sebagai pengelolaan sumber daya, dan pola pelayanan masyarakat secara prima, sehingga dapat memfasilitasi komunikasi dan partisipasi serta mengakomodasi perbedaan kepentingan serta mendorong proses pengambilan keputusan secara benar dan teratur dalam pencapaian hasil yang maksimal.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga Tahun 2027 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN.

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Landasan Hukum.
- 1.3. Maksud dan Tujuan.
- 1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA TAHUN 2025.

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dan Capaian Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2025.
- 2.2. Evaluasi Capaian SPM
- 2.3. Permasalahan dan Isu
- 2.4. Pokok-pokok pikiran DPRD.
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- 2.6. Inovasi

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
- 3.2. Arah Kebijakan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1 Uraian Program, Kegiatan dan Subkegiatan
- 4.2 Tematik

BAB V KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

5.1 Indikator Kinerja Utama

5.2 Indikator Kinerja Kunci

BAB VI PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Capaian Kinerja

Tahun 2025, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja melaksanakan 8 (delapan) program terdiri dari 16 (enam belas) kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) sub kegiatan. Total anggaran pada tahun 2025 sebesar Rp 10.786.349.709,- dengan penyerapan anggaran sampai dengan triwulan IV bulan Desember sebesar 87,85 % atau sebesar Rp 9.476.371.546, _

Target dan Realisasi Anggaran pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2025 dapat dilihat pada lampiran tabel 2.1.

Dalam pelaksanaan Renja tahun 2025, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja telah memenuhi target kinerja yang ditentukan, seperti misalnya pada program Penempatan Tenaga Kerja, indicator persentase realisasi kegiatan bursa tenaga kerja dengan target renja 2025 sebesar 100 %, sedangkan realisasi capaian sebesar 103,33%. Jika dibandingkan dengan realisasi capaian tahun 2024 yaitu 103,33%, maka capaian tahun 2025 dapat mempertahankan capaian kinerja. Hal ini dikarenakan pada tahun 2025, banyak perusahaan yang ikut bergabung dalam event bursa tenaga kerja/Job Fair.

Adapun Evaluasi Pelaksanaan RENJA Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2025 dan Target RENSTRA sampai dengan Tahun 2025 dapat dilihat pada lampiran tabel 2.1.1

A. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar : Urusan Ketenagakerjaan

Pembagian Urusan Pemerintahan bidang Tenaga Kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah meliputi 1) Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, 2) Penempatan Tenaga Kerja, 3) Hubungan Industrial. Berdasarkan pembagian urusan tersebut maka kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait dengan pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja meliputi: pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi, pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta, perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja,

konsultansi produktivitas pada perusahaan kecil dan pengukuran produktivitas tingkat Daerah. Selanjutnya berkaitan dengan penempatan tenaga kerja, maka kewenangan Pemerintah kabupaten/kota meliputi: pelayanan antar kerja di daerah kabupaten/kota, penerbitan izin LPTKS dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, pengelolaan informasi pasar kerja dalam Daerah kabupaten/kota, perlindungan TKI di luar negeri (pra dan purna penempatan) di Daerah kabupaten/kota. Kemudian terkait dengan hubungan industrial kewenangan pemerintah kabupaten/kota meliputi: pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota, pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di Daerah.

Berdasarkan pasal 11 Perwali Nomor 124/2021, Bidang Ketenagakerjaan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang tenaga kerja sub urusan pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja dan hubungan industrial serta bidang transmigrasi sub urusan pembangunan kawasan transmigrasi.

Realisasi pelayanan urusan ketenagakerjaan pada tahun 2025 dan perkiraan realisasi tahun 2026 serta proyeksi 2027 meliputi:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga

NO	INDIKATOR	SPM / STANDAR NASIONAL	IKK /IKU	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2025 (n- 2)	Perkiraan Th 2026 (n-1)	Tahun 2027 (n)	Tahun 2028 (n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	URUSAN TENAGA KERJA											
1	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	-	IUP/IKD	6,46- 5,51	6,46- 5,51	4,30- 3,39	4,26- 3,00	3,67%	6,46-5,51	4,30- 3,39	4,26- 3,00	-
2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	-	IKU/IKD	69,97%	70,10%	71,27%	71,52%	70,93%	70,10%	71,27%	71,52%	-
3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	-	IUP	65,18%	66,74%	67,52%	68,30%	62,30%	66,74%	67,52%	68,30%	indikator baru
4	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	-	IKK	98,40%	99,72%	118,91%	123,15%	104,297%	99,72%	118,91%	123,15%	-
5	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	-	-	50%	50%	-	-	79,38%	50%	-	-	-
6	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kab/Kota	-	IKK	71,26%	71,48%	71,69%	71,91%	79,38%	71,48%	71,69%	71,91%	indikator baru
7	Persentase lembaga pelatihan kerja swasta (LPKS) memiliki izin	-	-	90%	100%	-	-	68,00%	100%	-	-	-
8	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja	-	IKK	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-
9	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja		IUP/IKD	51,76%	54%	56,24%	58,47%	66,49%	54%	56,24%	58,47%	indikator baru

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga

NO	INDIKATOR	SPM / STANDAR NASIONAL	IKK /IKU	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2025 (n- 2)	Perkiraan Th 2026 (n-1)	Tahun 2027 (n)	Tahun 2028 (n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	Pertumbuhan Produktivitas Tenaga Kerja		IKU	5,25%	5,32%	5,39%	5,46%	5,18%	5,32%	5,39%	5,46%	indikator baru
11	Tingkat Kesempatan Kerja		IKU	97,01%	97,88%	98,75%	99,62%	96,32%	97,88%	98,75%	99,62%	indikator baru
12	Prosentase Tenaga Kerja yang bersertifikat kompetensi	-	IKK	100,00%	100%	100%	100%	1,00%	100%	100%	100%	
13	Prosentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan	-	IKK	93,51%	93,79%	94,07%	94,35%	46,47%	93,79%	94,07%	94,35%	
14	Prosentase Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	-	-	70%	100%	100%	-	205%	100%	100%	-	-
15	Persentase realisasi kegiatan bursa tenaga kerja	-	-	100%	100%	100%	-	103%	100%	100%	-	

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga

NO	INDIKATOR	SPM / STANDAR NASIONAL	IKK /IKU	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan
				Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2025 (n- 2)	Perkiraan Th 2026 (n-1)	Tahun 2027 (n)	Tahun 2028 (n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	Persentase penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial	-	-	35%	37%	37%	-	73,68%	37%	37%	-	
17	Persentase Tenaga Kerja yang Terlatih			-	0,31%	0,34%	0,36%	1,02%	0,31%	0,34%	0,36%	indikator baru

B. Urusan Pemerintahan Pilihan : Urusan Perindustrian

Berdasarkan pasal 8 Perwali Nomor 124/2021, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah adalah sub urusan perencanaan pembangunan industri, perizinan dan sistem informasi industri nasional.

Realisasi pelayanan urusan perindustrian pada tahun 2025 triwulan IV dan perkiraan realisasi tahun 2026 serta proyeksi 2027 meliputi:

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga

NO	INDIKATOR	SPM / STANDAR NASIONAL	IKK /IKU	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2025 (n- 2)	Perkiraan Th 2026 (n-1)	Tahun 2027 (n)	Tahun 2028 (n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	URUSAN PERINDUSTRIAN											
1	Persentase Pertumbuhan IKM	-	-	0,43%	0,49%	-	-	0,55%	0,49%	-	-	-
2	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	-	IKU	33,33%	33,91%	34,20%	34,49%	33,10%	33,91%	34,20%	34,49%	-
3	Rasio PDRB Industri pengolahan		IUP/IKD	31,10%	34,32%	34,60%	34,89%	33,10%	34,32%	34,60%	34,89%	-
4	Persentase jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang diterbitkan		IKU	100%	100%	100%	100%	75,57	100%	100%	100%	indikator baru
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait		IKU	100%	100%	100%	100%	9,54%	100%	100%	100%	
6	Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah di Kab/Kota	-	IKK	0,48%	0,50%	0,55%	0,60%	1,85%	0,50%	0,55%	0,60%	indikator baru
7	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN (Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional) yang ditetapkan		IKK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	indikator baru

NO	INDIKATOR	SPM / STANDAR NASIONAL	IKK /IKU	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Perkiraan	Tahun	Tahun	
				2025	2026	2027	2028	2025 (n-2)	Th 2026 (n-1)	(n)	(n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	dalam RPIK (Rencana Pembangunan Industri Kota)											
8	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait		IKK	100%	100%	100%	100%	0	100%	100%	100%	
9	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kota		IKK	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini		IKK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
11	Prosentase industri kota salatiaga yang berkembang	-	-	0,56%	0,75%	0,75%	-	0,31%	0,75%	0,75%	-	
12	Persentase Jumlah usaha industri yang memiliki akun SIINAS dan melaporkan data industri	-	-	5,60%	6,00%	6%	-	16,87%	6,00%	6%	-	

C. Urusan Pemerintahan Pilihan : Urusan Transmigrasi

Berdasarkan pasal 11 Perwali Nomor 124/2021, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang transmigrasi adalah sub urusan pembangunan kawasan transmigrasi. Pada tahun 2025 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja memberangkatkan 1 (SATU) KK calon transmigran.

Realisasi pelayanan urusan transmigrasi pada tahun 2025 triwulan IV dan perkiraan realisasi tahun 2026 serta proyeksi 2027 meliputi:

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga

NO	INDIKATOR	SPM / STANDAR NASIONAL	IKK /IKU	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2025 (n- 2)	Perkiraan Th 2026 (n-1)	Tahun 2027 (n)	Tahun 2028 (n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	URUSAN TRANSMIGRASI											
1	Prosentase peminat transmigrasi	-	IKU	4,07%	4,60%	20,00%	20,00%	88,89%	4,60%	20,00%	20,00%	-
2	Prosentase Peningkatan Peminat Transmigrasi	-	-	1%	6,09%	6,09%	-	700,00%	6,09%	6,09%	-	-
3	Persentase Pelaksanaan Proses Transmigrasi	-	-	100%	60%	60%	60%	40%	60%	60%	60%	

Keseluruhan pencapaian target pelayanan urusan pemerintahan Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Transmigrasi sebagaimana terlampir pada tabel 2.2.

2.2. Evaluasi capaian SPM

Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, evaluasi terhadap capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) belum dapat disajikan. Hal ini disebabkan karena urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja tidak termasuk dalam urusan yang memiliki kewajiban penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, tidak terdapat indikator, target, maupun realisasi capaian SPM yang dapat dievaluasi sebagai bagian dari dokumen perencanaan.

Sebagai pengganti evaluasi capaian SPM, penilaian kinerja perangkat daerah difokuskan pada pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra), Perjanjian Kinerja, serta indikator kinerja program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah. Evaluasi tersebut dilakukan melalui pengukuran tingkat pencapaian target kinerja, efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, serta kontribusi terhadap peningkatan pelayanan publik di bidang perindustrian dan ketenagakerjaan.

Oleh karena itu, penyusunan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja tetap mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, analisis permasalahan dan isu strategis, kebijakan nasional dan daerah, serta kebutuhan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, sehingga perencanaan yang disusun tetap terarah, terukur, dan akuntabel meskipun tidak memuat evaluasi capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).

2.3 Permasalahan dan Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Permasalahan utama Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja terbagi berdasarkan urusan yang diampu yaitu:

- ❖ **Urusan Tenaga Kerja:** Ketidaksesuaian antara ketersediaan lapangan pekerjaan dengan kompetensi permintaan tenaga kerja.
- ❖ **Urusan Perindustrian:** Rendahnya daya saing IKM dan belum optimalnya nilai tambah beberapa produk industri kecil dan menengah, sebagai akibat dari belum ada perizinan dan berbadan hukum, kurang promosi, kekurangan modal, dan kurangnya pendampingan.
- ❖ **Urusan Transmigrasi:** Rendahnya persentase peminat transmigrasi maupun jumlah calon transmigran disebabkan karena ketidaksesuaian lokasi dengan minat catran dan masih kurang optimalnya kegiatan fasilitasi program transmigrasi yang dilaksanakan pemerintah Kota Salatiga

Perumusan permasalahan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja akan mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja di masa lalu, dilakukan dengan menganalisis lingkungan internal dan maupun eksternal. Permasalahan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja yang teridentifikasi menjadi input bagi perumusan tujuan dan sasaran yang bersifat proritas sesuai Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Permasalahan umum pada urusan kewilayahan adalah :

Urusan Tenaga Kerja

- a. Belum adanya kesesuaian antara ketersediaan lapangan pekerjaan dengan kompetensi pencari kerja.
- b. Relatif tingginya jumlah pengangguran terbuka, tercatat ditahun 2025 mencapai 4200 orang atau sebesar 3,67%.
- c. Banyaknya pihak perusahaan yang tidak melaporkan data baik lowongan kerja maupun penempatannya.
- d. Belum memiliki Balai Latihan Kerja (BLK) yang memenuhi standar untuk menunjang kegiatan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja.
- e. Belum adanya sekretariat bersama Lembaga Kerjasama Tripartit..
- f. Kurangnya fasilitasi dalam pembinaan, pengembangan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
- g. Banyaknya perusahaan yang belum memiliki peraturan perusahaan.

Urusan Perindustrian

- a. Masih rendahnya pertambahan IKM di kota Salatiga.
- b. Belum ada kawasan industri.
- c. Belum berkembangnya cluster IKM di Kota Salatiga.
- d. Belum optimalnya kelembagaan dan kurangnya sarana prasarana untuk mendukung Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda).
- e. Belum adanya pemantauan secara rutin terhadap limbah industri.
- f. Belum adanya pengawasan dan pengendalian ijin usaha industri.
- g. Rendahnya jumlah usaha industri yang memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) dan melaporkan data industrinya.

Urusan Transmigrasi

- a. Ketidaksesuaian minat calon transmigran (Catran) dengan lokasi/destinasi transmigrasi yang sediakan sehingga persentase peminat transmigrasi yang merupakan indikator keberhasilan kinerja urusan transmigrasi belum mencapai target yang telah ditetapkan, dengan rata-rata capaian 20%.
- b. Fasilitasi pelaksanaan program transmigrasi oleh pemerintah Kota Salatiga belum dilaksanakan secara optimal.
- c. Kebijakan transmigrasi di Kota Salatiga yang merupakan kepanjangan tangan dari kebijakan pusat dan provinsi menyebabkan alokasi jumlah calon transmigran dan penentuan lokasi transmigrasi bersifat *given*, yang selanjutnya menjadi salah satu kendala penurunan minat calon transmigran. Hal ini menjadi penyebab belum tercapainya kinerja urusan transmigrasi di Kota Salatiga.

Isu strategis menjadi dasar dalam menentukan kondisi yang harus diselesaikan dimasa yang akan datang. Isu strategis diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang, oleh karena itu untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

2.4 Pokok-pokok pikiran DPRD

Telaahan terhadap Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD dilakukan sebagai bagian dari proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja untuk memastikan keterpaduan antara aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui DPRD dengan prioritas pembangunan daerah serta tugas dan fungsi perangkat daerah.

Berdasarkan hasil inventarisasi usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD, tidak terdapat usulan yang secara langsung menjadi kewenangan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, atau usulan yang disampaikan belum sesuai dengan ruang lingkup urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsi perangkat daerah. Oleh karena itu, tidak terdapat program maupun kegiatan yang dapat diakomodasi ke dalam Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja berdasarkan Pokok-Pokok Pikiran DPRD pada tahun perencanaan ini.

Meskipun demikian, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja tetap berkomitmen untuk memperhatikan dan menelaah setiap aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui DPRD. Apabila pada proses perencanaan selanjutnya terdapat usulan yang sesuai dengan kewenangan, prioritas pembangunan daerah, ketersediaan pendanaan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan, maka usulan tersebut akan dipertimbangkan untuk diakomodasi dalam program dan kegiatan perangkat daerah sesuai mekanisme perencanaan dan penganggaran yang berlaku.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan usulan program dan kegiatan dari pada pemangku kepentingan pada Rencana Kerja tahun 2027 belum ada, karena usulan program kegiatan dari pemangku kepentingan diperoleh melalui musrenbang kelurahan maupun kecamatan sebagaimana terlampir pada Tabel 2.4. Pada saat dokumen ini disusun kegiatan musrenbang belum dilaksanakan sehingga belum dilakukan analisis usulan kegiatan dengan program yang dilaksanakan di kecamatan.

2.6 Inovasi bidang urusan dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat

Penyediaan data dan informasi penempatan tenaga kerja dan transmigrasi yang lengkap dan relevan akan sangat berguna bagi beberapa pihak, yaitu: bagi masyarakat sebagai parapencari kerja untuk mendapatkan informasi lowongan kerja yang tersedia dan bagi perusahaan penyedia lowongan untuk mendapatkan informasi mengenai pencari kerja yang akan ditempatkan untuk mengisi lowongan kerja yang ada sedangkan bagi instansi lain yang membutuhkan informasi ketenagakerjaan, termasuk Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga sebagai instansi yang bertanggung jawab terhadap masalah ketenagakerjaan dalam menetapkan peraturan dan kebijakan-kebijakan di bidang ketenagakerjaan. Selain itu pengawasan akan informasi ketenagakerjaan tersebut juga tidak kalah pentingnya. Untuk itu, pengawasan informasi ketenakerjaan tersebut haruslah dapat diakses dan dikelola dengan mudah dan cepat. Dalam era perkembangan teknologi seperti sekarang ini, baik di instansi pemerintah maupun swasta dituntut untuk dapat mengikuti serta mengetahui derasnya arus informasi dalam segala bidang khususnya dalam bidang komputer. Dengan pemakaian komputer tersebut akan semakin mempermudah dalam melakukan pengolahan data. Hal ini sangat berpengaruh dalam efisiensi dan efektivitas kerja. Sistem Informasi Lowongan Kerja Salatiga (SIOLGA) adalah suatu perangkat lunak yang dapat digunakan untuk mengolah data-data tentang ketenagakerjaan dan data-data tersebut disimpan pada basis data. Aplikasi ini dapat digunakan untuk menangani proses pengisian data, perubahan data, penghapusan data dan pencarian data.

Sistem Informasi Lowongan Kerja Salatiga (SIOLGA) ini di harapkan menjadi Portal Sistem Informsi Pengelolaan Data dan Informasi pelaksanaan kegiatan pengentasan pengangguran yang ada di Kota Salatiga dengan akses user seluruh pencaker di kota salatiga dan perusahaan baik di salatiga maupun di luar salatiga. Mulai dari info lowongan, pendaftaran online, dan pelamaran online. Di harapkan juga system monitoring pengawasan akan pelaksanaan penempatan tenaga kerja juga bisa di lakukan dari aplikasi ini.

Di harapkan dengan adanya Sistem Informasi Lowongan Kerja Salatiga (SIOLGA) kota salatiga ini yang terintegrasi dengan aplikasi emakaryo jawa tengah dapat memperluas informasi lowongan pekerjaan yang dapat di akses online oleh pencaker kota salatiga sehingga di harapkan bisa mempercepat pengentasan pengangguran yang ada di kota salatiga. Dengan system aplikasi

Maksud dan Tujuan dari Pembuatan Sistem Informasi Lowongan Kerja Salatiga (SIOLGA) Pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga adalah:

- a. Pembuatan Sistem Informasi Lowongan Kerja Salatiga (SIOLGA) yang bisa di akses secara online bagi perusahaan dan pencaker salatiga di dalam proses requitment calon pekerja.
- b. Mengembangkan Sistem Informasi Lowongan Kerja Salatiga (SIOLGA) salatiga yang terintegrasi dengan aplikasi emakaryo jawa tengah dengan tujuan memperluas informasi pasar kerja bagi pencaker kota salatiga
- c. Mengembangkan Aplikasi satu portal system data di bidang penempatan tenaga kerja kota salatiga yang bisa di akses oleh seluruh masyarakat kota salatiga
- d. Meningkatkan proses monitoring dan pengawasan di dalam penempatan tenaga kerja yang di laksanakan secara online.
- e. Memudahkan semua entitas yang terlibat di dalam sistem penempatan tenaga kerja di kota salatiga baik dinas peridustrian dan tenaga kota salatiga, perusahaan ataupun pencakernya di dalam pegelolaan data dan informasi.
- f. Termonitornya system progress requirement pegawai yang di laksanakan oleh perusahaan kepada pencaker oleh dinas tenaga kerja. Sehingga proses pengawasan dapat di tingkatkan di dalam memantau jumlah penempatan tenaga kerja.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja

Penentuan Tujuan dan Sasaran dalam dalam Renja 2027 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, disusun dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga Tahun 2025-2029, sebagai berikut:

A. TUJUAN:

Tujuan yang ingin dicapai Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga yaitu :

1. Meningkatnya produktivitas tenaga kerja dan kontribusi sektor industri terhadap pertumbuhan ekonomi

B. SASARAN.

Sasaran yang ingin dicapai Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga adalah:

1. Meningkatnya Partisipasi angkatan kerja dan penyerapan tenaga kerja di pasar tenaga kerja
2. Meningkatnya pertumbuhan industri kecil dan menengah
3. Meningkatnya minat transmigrasi

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renja

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Definisini Operasional/Rumus	Satuan	Capaian 2025	Target 2027	Target 2030
1	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja dan kontribusi sektor industri terhadap pertumbuhan ekonomi		Pertumbuhan Produktivitas Tenaga Kerja	$(\text{Produktivitas Tahun } N - \text{Produktivitas tahun } (N-1)) \div \text{Produktivitas Tahun } N-1 \times 100\%$	%	5,18	5,39	5,6
			Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	$(\text{jumlah kontribusi PDRB sektor Industri} \div \text{Jumlah PDRB}) \times 100\%$	%	33,1	34,2	35,06
		Meningkatnya Partisipasi angkatan kerja dan penyerapan tenaga kerja di pasar tenaga kerja	Tingkat Kesempatan Kerja	$(\text{Penduduk Bekerja} \div \text{Angkatan Kerja}) \times 100\%$	%	96,32	98,75	101,37
		Meningkatnya pertumbuhan industri kecil dan menengah	Persentase jumlah izin usaha industri (IUI) Kecil dan IUI Menengah yang diterbitkan	$(\text{jumlah IUI yang diterbitkan} \div \text{Jumlah permohonan pengajuan izin IUI yang masuk}) \times 100\%$	%	75,57	100	100
		Meningkatnya minat transmigrasi	Persentase peminat transmigrasi	$\text{Jumlah calon transmigran yang berminat} \div \text{peserta penyuluhan calon transmigran} \times 100\%$	%	88,89	20	20

3.2 Arah Kebijakan

Asta Cita Presiden merupakan delapan agenda besar pembangunan nasional yang menjadi pedoman strategis untuk mewujudkan transformasi Indonesia menuju negara maju. Penelaahan Asta Cita diperlukan agar prioritas pembangunan nasional dapat diterjemahkan dengan tepat oleh perangkat daerah, termasuk Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (PerinNaker), sehingga seluruh kebijakan dan program yang dirumuskan sejalan dengan visi pembangunan nasional dan mendukung pencapaian target RPJMN.

Secara umum, penelaahan Asta Cita menunjukkan bahwa agenda pembangunan nasional menekankan dua bidang utama yang sangat terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, yaitu penguatan struktur industri nasional dan penciptaan tenaga kerja yang kompeten, produktif, dan terlindungi. Oleh karena itu, seluruh agenda Asta Cita perlu dipetakan untuk memastikan sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah serta mengidentifikasi kontribusi strategis perangkat daerah.

Pertama, Asta Cita 1: Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Peningkatan Perlindungan Sosial, memberikan arahan agar pemerintah daerah memperkuat akses masyarakat terhadap pekerjaan layak dan kesempatan berusaha. Dalam konteks tugas Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, hal ini menuntut peningkatan efektivitas layanan penempatan kerja, penyediaan pelatihan vokasi bagi kelompok miskin dan rentan, serta perluasan wirausaha melalui pengembangan IKM dan unit usaha produktif.

Kedua, Asta Cita 2: Transformasi Ekonomi Berbasis Hilirisasi dan Penguatan Industri, sangat relevan dengan urusan perindustrian. Arah kebijakan nasional menekankan hilirisasi sumber daya alam, peningkatan nilai tambah industri, dan pengembangan rantai pasok. Bagi dinas, hasil penelaahan ini menegaskan pentingnya penguatan pembinaan IKM, pengembangan kawasan industri daerah, fasilitasi standardisasi produk, akses pasar, dan penggunaan teknologi modern.

Agenda ini juga mendorong peningkatan investasi dan penciptaan lapangan kerja baru di sektor industri.

Ketiga, Asta Cita 3: Peningkatan Kualitas SDM dan Penciptaan Lapangan Kerja, merupakan langsung berkaitan dengan urusan ketenagakerjaan. Pemerintah mengamanatkan reformasi pelatihan vokasi, sertifikasi kompetensi, peningkatan produktivitas tenaga kerja, serta kolaborasi antara BLK dan dunia usaha. Penelaahan ini menunjukkan bahwa dinas harus memastikan seluruh program vokasi berbasis kebutuhan industri (demand driven), memperluas akses sertifikasi kompetensi, dan mengembangkan link and match antara industri dan lembaga pelatihan.

Keempat, Asta Cita 4: Pemerataan Infrastruktur dan Wilayah, terutama pembangunan kawasan industri, kawasan ekonomi, dan infrastruktur pendukung perekonomian. Arah ini menguatkan kebutuhan daerah untuk menciptakan iklim investasi industri yang kondusif, meningkatkan konektivitas sentra IKM, serta mempercepat tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru yang dapat menyerap tenaga kerja.

Kelima, Asta Cita 5: Transformasi Digital Pemerintahan dan Layanan Publik, menekankan kewajiban OPD untuk melakukan digitalisasi layanan. Penelaahan terhadap agenda ini menunjukkan bahwa dinas harus mengembangkan dan memanfaatkan sistem informasi ketenagakerjaan, sistem informasi industri nasional, digitalisasi pelayanan perizinan industri, serta meningkatkan keterbukaan data untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data.

Keenam, Asta Cita 6: Penguatan Ekonomi Hijau dan Transisi Energi, mendorong perubahan paradigma industri menjadi lebih efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Bagi dinas, hal ini menjadi dasar kebijakan untuk meningkatkan bimbingan industri hijau, efisiensi energi, dan penerapan standarisasi lingkungan pada IKM maupun industri menengah-besar. Penelaahan ini menegaskan bahwa industri

daerah harus diarahkan menuju green industry untuk meningkatkan daya saing jangka panjang.

Ketujuh, Asta Cita 7: Penguatan Ketahanan Sosial, Budaya, dan Lapangan Kerja, memiliki keterkaitan erat dengan upaya menciptakan hubungan industrial yang harmonis. Dalam hasil penelaahan, dinas memiliki tugas untuk memperkuat pengawasan ketenagakerjaan, penyelesaian perselisihan hubungan industrial, perlindungan pekerja perempuan dan anak, serta perluasan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Kedelapan, Asta Cita 8: Reformasi Hukum dan Birokrasi, mengamanatkan penyederhanaan regulasi usaha dan peningkatan efektivitas pengawasan. Bagi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, penelaahan terhadap agenda ini menegaskan pentingnya peningkatan tata kelola layanan perindustrian dan ketenagakerjaan, simplifikasi layanan perizinan industri, serta peningkatan kualitas aparatur melalui pelatihan dan sistem merit.

Berdasarkan hasil penelaahan secara keseluruhan, Asta Cita Presiden memberikan arah yang jelas bahwa peran Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sangat strategis dalam mendukung transformasi ekonomi nasional. Dinas tidak hanya bertanggung jawab dalam menguatkan struktur industri daerah, tetapi juga memastikan ketersediaan tenaga kerja yang kompeten, penciptaan lapangan kerja produktif, serta terlindunginya hak-hak pekerja. Dengan demikian, sinkronisasi program dinas dengan Asta Cita menjadi kunci untuk memastikan pembangunan daerah berkontribusi nyata terhadap target pembangunan nasional.

Dukungan program dan kebijakan daerah terhadap prioritas nasional tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 3.2
Dukungan Program dan Kegiatan Daerah terhadap Prioritas Nasional

No	Prioritas Nasional	Program	Aktivitas
1	Peningkatan Kualitas SDM dan Penciptaan Lapangan Kerja	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga kerja	Perencanaan dan Persiapan Pelatihan
			Pelaksanaan Pelatihan Kerja
			Sertifikasi Kompetensi
			Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja
			Penempatan dan Layanan Pasca Pelatihan
			Evaluasi dan Pelaporan
2	Penguatan Ketahanan Sosial, Budaya, dan Lapangan Kerja	Program Penempatan Tenaga Kerja	Perencanaan & Pengelolaan Layanan Penempatan
			Pelayanan Antar Kerja (AKAD / Job Matching)
			Fasilitasi Rekrutmen
			Bursa Kerja / Job Fair
			Penempatan Tenaga Kerja Dalam & Luar Negeri
			Layanan Informasi Pasar Kerja (IPK)
			Penguatan Kelembagaan Layanan Penempatan
			Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan
		Program Hubungan Industrial	Pembinaan Hubungan Industrial
			Penguatan Kelembagaan Hubungan Industrial
			Pengupahan
			Penyusunan & Pendaftaran Peraturan Perusahaan (PP) / Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
			Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
			Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
			Hubungan Kerja & Norma Kerja
			Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan
		Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Perencanaan dan Seleksi Calon Transmigran
			Pembekalan Pra-Pemberangkatan
			Pengurusan Administrasi Pemberangkatan
			Fasilitasi Logistik dan Transportasi
			Pendampingan Teknis Selama Pemberangkatan
			Koordinasi Penerimaan di Daerah Tujuan
			Monitoring dan Evaluasi Pasca Pemberangkatan
2	Transformasi Ekonomi Berbasis Hilirisasi dan Penguatan Industri	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Industri
			Pengembangan Kawasan dan Sentra Industri
			Pembinaan dan Fasilitasi Industri
			Pengembangan SDM dan Kelembagaan Industri
			Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM)
			Penumbuhan dan Pengembangan Wirausaha Industri Baru
			Pengawasan dan Tata Kelola Industri
			Pengumpulan Data dan Informasi Industri
			Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

Tabel 3.2
 Dukungan Program dan Kegiatan Daerah terhadap Prioritas Nasional

No	Prioritas Nasional	Program	Aktivitas
		Program Pengendalian Ijin Usaha Industri Kabupaten/Kota	
			Perencanaan & Pengelolaan Layanan Perizinan
			Pelayanan Perizinan Usaha Industri
			Pengendalian dan Pengawasan Industri Berizin
			Penegakan Kepatuhan & Penanganan Pelanggaran
			Pembinaan dan Edukasi Pelaku Industri
			Pengembangan Sistem Informasi Perizinan Industri
			Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Pendataan dan Pemutakhiran Data Industri
			Fasilitasi Pelaporan Industri Melalui SIINas
			Validasi dan Pengawasan Data SIINas
			Pengembangan dan Integrasi Sistem Informasi Industri
			Pembinaan dan Edukasi Pelaku Industri
			Koordinasi dan Kolaborasi Antar Instansi
			Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

Telahaan terhadap Kebijakan Provinsi

Tujuan jangka menengah Dinas Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan transformasi ekonomi berbasis lingkungan dan transformasi social didukung tata kelola berkelanjutan

Sasaran jangka menengah Dinas Perindustrian danPerdagangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 adalah :

1. Terwujudnya Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berbasis Lingkungan.
2. Terwujudnya Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter.

Tabel 3.3

Dukungan Program dan Kegiatan Daerah terhadap Prioritas Provinsi

No	Prioritas Provinsi	Program	Aktivitas
1	Peningkatan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga kerja	Perencanaan dan Persiapan Pelatihan
			Pelaksanaan Pelatihan Kerja
			Sertifikasi Kompetensi
			Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja
			Penempatan dan Layanan Pasca Pelatihan
			Evaluasi dan Pelaporan
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Perencanaan & Pengelolaan Layanan Penempatan
			Pelayanan Antar Kerja (AKAD / Job Matching)
			Fasilitasi Rekrutmen
			Bursa Kerja / Job Fair
			Penempatan Tenaga Kerja Dalam & Luar Negeri
			Layanan Informasi Pasar Kerja (IPK)
			Penguatan Kelembagaan Layanan Penempatan
			Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan
		Program Hubungan Industrial	Pembinaan Hubungan Industrial
			Penguatan Kelembagaan Hubungan Industrial
			Pengupahan
			Penyusunan & Pendaftaran Peraturan Perusahaan (PP) / Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
			Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
			Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
			Hubungan Kerja & Norma Kerja
			Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan
		Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Perencanaan dan Seleksi Calon Transmigran
			Pembekalan Pra-Pemberangkatan
			Pengurusan Administrasi Pemberangkatan
			Fasilitasi Logistik dan Transportasi
			Pendampingan Teknis Selama Pemberangkatan
			Koordinasi Penerimaan di Daerah Tujuan
			Monitoring dan Evaluasi Pasca Pemberangkatan
2	Peningkatan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berbasis Lingkungan	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Industri
			Pengembangan Kawasan dan Sentra Industri
			Pembinaan dan Fasilitasi Industri
			Pengembangan SDM dan Kelembagaan Industri
			Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM)
			Penumbuhan dan Pengembangan Wirausaha Industri Baru
			Pengawasan dan Tata Kelola Industri
			Pengumpulan Data dan Informasi Industri

Tabel 3.3
 Dukungan Program dan Kegiatan Daerah terhadap Prioritas Provinsi

No	Prioritas Provinsi	Program	Aktivitas
		Program Pengendalian Ijin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan
			Perencanaan & Pengelolaan Layanan Perizinan
			Pelayanan Perizinan Usaha Industri
			Pengendalian dan Pengawasan Industri Berizin
			Penegakan Kepatuhan & Penanganan Pelanggaran
			Pembinaan dan Edukasi Pelaku Industri
			Pengembangan Sistem Informasi Perizinan Industri
			Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Pendataan dan Pemutakhiran Data Industri
			Fasilitasi Pelaporan Industri Melalui SIINas
			Validasi dan Pengawasan Data SIINas
			Pengembangan dan Integrasi Sistem Informasi Industri
			Pembinaan dan Edukasi Pelaku Industri
			Koordinasi dan Kolaborasi Antar Instansi
			Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan misi yang tercantum dalam Misi RPJPD Kota Salatiga adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju dan cerdas.
2. Meningkatkan apresiasi dan penguatan pemajuan kebudayaan daerah
3. Meningkatkan prestasi pemuda dan olahraga.
4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan pengendalian pertumbuhan penduduk.
5. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk.
6. Mewujudkan pengelolaan potensi daerah yang mendorong pada peningkatan
7. kerjasama antar daerah dan antar pelaku investasi dalam memperluas kesempatan kerja di Kota Salatiga.
8. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial.
9. Meningkatkan perlindungan, pemenuhan hak-hak anak, dan pencapaian kesetaraan dan keadilan gender.
10. Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah.
11. Menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang tentram, tertib dan aman guna menunjang efektifitas pembangunan.
12. Meningkatkan kualitas penataan ruang dan infrastruktur dalam mendukung pertumbuhan wilayah secara merata.
13. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.
14. Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan air bersih, sanitasi, lingkungan perumahan dan permukiman perkotaan yang merata bagi masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas hidup

Beberapa indikator SDGs yang dapat didukung dalam program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja antara lain :

1. Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan social.
2. Laju Pertumbuhan PDRB per kapita (laju pertumbuhan PDB per kapita)
3. Presentase Tenaga kerja formal (Proporsi lapangan kerja informal, berdasarkan sektor dan jenis kelamin)
4. Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur (Idem)
5. Koefisien Gini (Indeks Gini atau Rasio Gini)

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2027 adalah:

a. Urusan Pemerintahan Tenaga Kerja

1) Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja

Indikator Program : Prosentase Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi

1.1 Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi

1.1.1 Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi

2) Program Penempatan Tenaga Kerja

Indikator Program : Persentase realisasi kegiatan bursa tenaga kerja

2.1 Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja

2.1.1 Sub Kegiatan Job Fair/Bursa Kerja

3) Program Hubungan Industrial

Indikator Program : Persentase penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial dan Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)

- 3.1 Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - 3.1.1 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan
- 3.2 Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
 - 3.2.1 Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - 3.2.2 Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota
 - 3.2.3 Sub Kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja

b. Urusan Pemerintahan Pilihan Perindustrian

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Program : Indeks Kepuasan Masyarakat

- 1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1.1 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 1.1.2 Sub Kegiatan Pelaksanaan pengumpulan data statistic sektoral daerah
- 1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1.2.1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 1.2.2 Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- 1.3 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 1.3.1 Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
- 1.4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1.4.1 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 1.4.2 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 1.4.3 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 1.4.4 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 1.4.5 Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu
- 1.4.6 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 1.5 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.5.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 1.5.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 1.5.3 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.6 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.6.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 1.6.2 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 1.6.3 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - 1.6.4 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2) Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri

Indikator Program : Prosentase industri kota salatiga yang berkembang

- 2.1 Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
 - 2.1.1 Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
 - 2.1.2 Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan

Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

3) Program Pengendalian Ijin Usaha Industri Kabupaten /Kota

Indikator Program :

- Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait
- Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait

3.1 Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota

3.1.1 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI,IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

4) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Indikator Program : Persentase Jumlah usaha industri yang memiliki akun SIINAS dan melaporkan data industri

4.1 Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota

4.1.1 Sub Kegiatan Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

c. Urusan Pemerintahan Pilihan Transmigrasi

1) Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

Indikator Program: Persentase Pelaksanaan Proses Transmigrasi

1.1 Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

1.1.1 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah, pencapaian indicator SDGs, pengentasan kemiskinan, pencapaian NSPK dan SPM serta pendayagunaan potensi ekonomi daerah, maka dirumuskan Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2027 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sebagai berikut:

Tabel 4.1
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Anggaran Tematik
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga

No	Program / kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Kebutuhan dana
1	2	3	4
1	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Salatiga	340.070.691
1.1	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Salatiga	340.070.691
1.1.1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Salatiga	340.070.691,00
2	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Salatiga	180.000.000
2.1.	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Salatiga	180.000.000
2.1.1	Job Fair/Bursa Kerja	Salatiga	180.000.000
3	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Salatiga	461.000.000
3.1	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Salatiga	37.000.000
3.1.1	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Salatiga	37.000.000,00
3.2.	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Salatiga	424.000.000

Tabel 4.1
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Anggaran Tematik
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga

No	Program / kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Kebutuhan dana
3.2.1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Salatiga	180.000.000,00
3.2.2	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Salatiga	44.000.000,00
3.2.3	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Salatiga	200.000.000,00
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Salatiga	4.770.072.513
4.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Salatiga	10.000.000
4.1.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Salatiga	5.000.000
4.1.2	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Salatiga	5.000.000
4.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Salatiga	3.940.072.513
4.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Salatiga	3.775.191.865
4.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Salatiga	164.880.648,00
4.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Salatiga	36.000.000
4.3.1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Salatiga	36.000.000,00
4.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Salatiga	248.500.000
4.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Salatiga	10.000.000,00
4.4.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Salatiga	28.000.000,00
4.4.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Salatiga	7.000.000,00
4.4.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Salatiga	155.000.000,00
4.4.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Salatiga	5.500.000,00
4.4.6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Salatiga	43.000.000,00
4.4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Salatiga	230.500.000
4.4.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Salatiga	500.000,00
4.4.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Salatiga	90.000.000,00
4.4.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Salatiga	140.000.000,00
4.5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Salatiga	305.000.000
4.5.1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Salatiga	25.000.000,00
4.5.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Salatiga	140.000.000,00

Tabel 4.1
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Anggaran Tematik
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga

No	Program / kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Kebutuhan dana
4.5.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Salatiga	30.000.000,00
4.5.4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Salatiga	110.000.000,00
5	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Salatiga	235.000.000
5.1	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Salatiga	235.000.000
5.1.1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Salatiga	35.000.000,00
5.1.2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Salatiga	200.000.000,00
6	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Salatiga	18.000.000
6.1	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Salatiga	18.000.000
6.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Salatiga	18.000.000,00
7	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Salatiga	15.000.000
7.1	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Salatiga	15.000.000
7.1.1	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Salatiga	15.000.000,00
8	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Salatiga	55.000.000
8.1	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Salatiga	55.000.000
8.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Salatiga	55.000.000,00
TOTAL ANGGARAN			6.074.143.204

4.2 Tematik

4.2.1. Program Dukungan terhadap Pembangunan Kota

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja menetapkan program dukungan terhadap prioritas pembangunan kota yang merupakan program kegiatan yang disusun mengacu pada prioritas dan sasaran pembangunan kota.

Tabel 4.2
Dukungan Program dan Kegiatan Terhadap Prioritas Kota

No	Prioritas Kota	Program	Aktivitas
1	Meningkatkan kapasitas tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri dan pasar kerja	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga kerja	Perencanaan dan Persiapan Pelatihan
			Pelaksanaan Pelatihan Kerja
			Sertifikasi Kompetensi
			Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja
			Penempatan dan Layanan Pasca Pelatihan
			Evaluasi dan Pelaporan
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Perencanaan & Pengelolaan Layanan Penempatan
			Pelayanan Antar Kerja (AKAD / Job Matching)
			Fasilitasi Rekrutmen
			Bursa Kerja / Job Fair
			Penempatan Tenaga Kerja Dalam & Luar Negeri
			Layanan Informasi Pasar Kerja (IPK)
			Penguatan Kelembagaan Layanan Penempatan
			Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan
		Program Hubungan Industrial	Pembinaan Hubungan Industrial
			Penguatan Kelembagaan Hubungan Industrial
			Pengupahan
			Penyusunan & Pendaftaran Peraturan Perusahaan (PP) / Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
			Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
			Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
			Hubungan Kerja & Norma Kerja
			Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan
		Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Perencanaan dan Seleksi Calon Transmigran
			Pembekalan Pra-Pemberangkatan
			Pengurusan Administrasi Pemberangkatan
			Fasilitasi Logistik dan Transportasi
			Pendampingan Teknis Selama Pemberangkatan
			Koordinasi Penerimaan di Daerah Tujuan
			Monitoring dan Evaluasi Pasca Pemberangkatan
2	Mengembangkan infrastruktur industri yang	Program Perencanaan dan Pembangunan	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Industri

Tabel 4.2
 Dukungan Program dan Kegiatan Terhadap Prioritas Kota

No	Prioritas Kota	Program	Aktivitas
	memadai, penyediaan wilayah peruntukan industri yang terintegrasi, peningkatan inovasi dengan memberikan insentif untuk adopsi teknologi terbaru dalam proses produksi.	Industri	Pengembangan Kawasan dan Sentra Industri
			Pembinaan dan Fasilitas Industri
			Pengembangan SDM dan Kelembagaan Industri
			Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM)
			Penumbuhan dan Pengembangan Wirausaha Industri Baru
			Pengawasan dan Tata Kelola Industri
			Pengumpulan Data dan Informasi Industri
			Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan
		Program Pengendalian Ijin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Perencanaan & Pengelolaan Layanan Perizinan
			Pelayanan Perizinan Usaha Industri
			Pengendalian dan Pengawasan Industri Berizin
			Penegakan Kepatuhan & Penanganan Pelanggaran
			Pembinaan dan Edukasi Pelaku Industri
			Pengembangan Sistem Informasi Perizinan Industri
			Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Pendataan dan Pemutakhiran Data Industri
			Fasilitasi Pelaporan Industri Melalui SIINas
			Validasi dan Pengawasan Data SIINas
			Pengembangan dan Integrasi Sistem Informasi Industri
			Pembinaan dan Edukasi Pelaku Industri
			Koordinasi dan Kolaborasi Antar Instansi
			Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

4.2.2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dirumuskan dengan mempertimbangkan pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan daerah, pengentasan kemiskinan, pencapaian SDGs.

Tabel 4.3

Dukungan Program dan Kegiatan Terhadap Kegiatan Tematik

No	Prioritas Kota	Program	Aktivitas
1	Pengentasan kemiskinan	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga kerja	Perencanaan dan Persiapan Pelatihan
			Pelaksanaan Pelatihan Kerja
			Sertifikasi Kompetensi
			Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja
			Penempatan dan Layanan Pasca Pelatihan
			Evaluasi dan Pelaporan
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Perencanaan & Pengelolaan Layanan Penempatan
			Pelayanan Antar Kerja (AKAD / Job Matching)
			Fasilitasi Rekrutmen
			Bursa Kerja / Job Fair
			Penempatan Tenaga Kerja Dalam & Luar Negeri
			Layanan Informasi Pasar Kerja (IPK)
			Penguatan Kelembagaan Layanan Penempatan
			Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan
		Program Hubungan Industrial	Pembinaan Hubungan Industrial
			Penguatan Kelembagaan Hubungan Industrial
			Pengupahan
			Penyusunan & Pendaftaran Peraturan Perusahaan (PP) / Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
			Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
			Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
			Hubungan Kerja & Norma Kerja
			Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan
		Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Perencanaan dan Seleksi Calon Transmigran
			Pembekalan Pra-Pemberangkatan
			Pengurusan Administrasi Pemberangkatan
			Fasilitasi Logistik dan Transportasi
			Pendampingan Teknis Selama Pemberangkatan
			Koordinasi Penerimaan di Daerah Tujuan
			Monitoring dan Evaluasi Pasca Pemberangkatan
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Industri
			Pengembangan Kawasan dan Sentra Industri
			Pembinaan dan Fasilitasi Industri
			Pengembangan SDM dan Kelembagaan Industri
			Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM)
			Penumbuhan dan Pengembangan Wirausaha Industri Baru
			Pengawasan dan Tata Kelola Industri
			Pengumpulan Data dan Informasi Industri
			Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

Kegiatan tematik didukung oleh 8 (delapan) program , 14 (empat belas) kegiatan dan 29 (dua puluh sembilan) sub kegiatan, dimana pelaksanaan kegiatan tersebut meliputi seluruh wilayah kota Salatiga.

Tabel 4.4
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Anggaran Tematik
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga

No	Program / kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Kebutuhan dana
1	2	3	4
1	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Salatiga	340.070.691
1.1	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Salatiga	340.070.691
1.1.1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Salatiga	340.070.691,00
2	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Salatiga	180.000.000
2.1.	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Salatiga	180.000.000
2.1.1	Job Fair/Bursa Kerja	Salatiga	180.000.000
3	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Salatiga	461.000.000
3.1	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Salatiga	37.000.000
3.1.1	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Salatiga	37.000.000,00
3.2.	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Salatiga	424.000.000
3.2.1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Salatiga	180.000.000,00
3.2.2	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Salatiga	44.000.000,00
3.2.3	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Salatiga	200.000.000,00
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Salatiga	4.770.072.513
4.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Salatiga	10.000.000
4.1.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Salatiga	5.000.000

Tabel 4.4
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Anggaran Tematik
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga

No	Program / kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Kebutuhan dana
1	2	3	4
4.1.2	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Salatiga	5.000.000
4.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Salatiga	3.940.072.513
4.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Salatiga	3.775.191.865
4.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Salatiga	164.880.648,00
4.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Salatiga	36.000.000
4.3.1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Salatiga	36.000.000,00
4.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Salatiga	248.500.000
4.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Salatiga	10.000.000,00
4.4.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Salatiga	28.000.000,00
4.4.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Salatiga	7.000.000,00
4.4.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Salatiga	155.000.000,00
4.4.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Salatiga	5.500.000,00
4.4.6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Salatiga	43.000.000,00
4.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Salatiga	230.500.000
4.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Salatiga	500.000,00
4.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Salatiga	90.000.000,00
4.5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Salatiga	140.000.000,00
4.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Salatiga	305.000.000
4.6.1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Salatiga	25.000.000,00
4.6.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Salatiga	140.000.000,00
4.6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Salatiga	30.000.000,00
4.6.4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Salatiga	110.000.000,00
5	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Salatiga	235.000.000
5.1	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Salatiga	235.000.000
5.1.1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Salatiga	35.000.000,00
5.1.2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta	Salatiga	200.000.000,00

Tabel 4.4
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Anggaran Tematik
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga

No	Program / kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Kebutuhan dana
1	2	3	4
	Masyarakat		
6	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Salatiga	18.000.000
6.1	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Salatiga	18.000.000
6.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Salatiga	18.000.000,00
7	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Salatiga	15.000.000
7.1	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Salatiga	15.000.000
7.1.1	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Salatiga	15.000.000,00
8	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Salatiga	55.000.000
8.1	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Salatiga	55.000.000
8.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Salatiga	55.000.000,00
TOTAL ANGGARAN			6.074.143.204

BAB V

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

5.1. Indikator Kinerja Utama Tahun 2027

Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan tolok ukur pencapaian kinerja perangkat daerah. IKU dan IKK yang ditetapkan digunakan sebagai parameter bagi perangkat daerah untuk mengukur pencapaian kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Penentuan target IKU Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dalam rangka mendukung tujuan yang telah ditetapkan, dapat dilihat dari tabel 4.5 berikut :

Tabel 5.1
Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

No	Indikator	Definisi Operasional/Rumus	Satuan	Capaian 2025	Target 2027	Target 2030	Keterangan
1	Pertumbuhan Produktivitas Tenaga Kerja	(Produktivitas Tahun N - Produktivitas tahun (N-1)) dibagi Produktivitas Tahun N-1) x 100%	%	5,18	5,39	5,6	
2	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	(jumlah kontribusi PDRB sektor Industri/ Jumlah PDRB) x 100%	%	33,1	34,2	35,06	
3	Tingkat Kesempatan Kerja	(Penduduk Bekerja dibagi Angkatan Kerja) x 100%	%	96,32	98,75	101,37	
4	Persentase jumlah izin usaha industri (IUI) Kecil dan IUI Menengah yang diterbitkan	(jumlah IUI yang diterbitkan/Jumlah permohonan pengajuan izin IUI yang masuk) x 100%	%	75,57	100	100	
5	Persentase peminat transmigrasi	Jumlah calon transmigran yang berminat dibagi peserta penyuluhan calon transmigran dikali 100%	%	88,89	20	20	

5.2. Indikator Kinerja Kunci Tahun 2027

Indikator Kinerja Kunci (IKK) memiliki arti penting sebagai ukuran utama yang mencerminkan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. IKK berfungsi memastikan bahwa arah pembangunan sektor perindustrian dan ketenagakerjaan terukur secara jelas, terfokus, dan relevan dengan visi, misi, serta prioritas pembangunan daerah maupun nasional. Dengan adanya IKK, kinerja dinas dapat dipantau secara obyektif, memudahkan evaluasi, serta menjadi dasar pengambilan keputusan dalam perumusan kebijakan maupun penyesuaian strategi. Selain itu, IKK memperkuat akuntabilitas dan transparansi, karena capaian pembangunan industri dan ketenagakerjaan dapat dinilai secara terukur oleh publik dan pemangku kepentingan.

Tabel 5.2
Indikator Kinerja Kunci Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

No	Indikator	Definisi Operasional/Rumus	Satuan	Capaian 2025	Target 2027	Target 2030	Keterangan
1	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin IPUI Kecil dan Menengah yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan/Jumlah izin yang dikeluarkan) * 100%	%	0	100	100	
2	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin IUI Kecil Menengah yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan/Jumlah izin yang dikeluarkan) * 100%	%	9,54	100	100	
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kota	Jumlah izin IUKI dan IPKI yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan/Jumlah izin yang dikeluarkan) * 100%	%	0	0	0	
4	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	(Jumlah kegiatan yang sesuai rencana tenaga kerja / Jumlah kegiatan keseluruhan yang direncanakan) x 100%	%	100	100	100	

Tabel 5.2
Indikator Kinerja Kunci Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

No	Indikator	Definisi Operasional/Rumus	Satuan	Capaian 2025	Target 2027	Target 2030	Keterangan
5	Persentase Kepatuhan pelaku usaha industri kecil dan menengah yang melaporkan informasi melalui sisten informasi industri nasional	(Jumlah pelaku usaha industri kecil dan menengah yang melaporkan informasi industri melalui sistem SIINAS / Jumlah seluruh pelaku usaha industri kecil dan menengah) x 100 %	%	1,82	4,85	9	Indikator baru
6	Persentase pekerja bukan penerima upah dan atau pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan	(Jumlah pekerja bukan penerima upah dan atau pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan / Jumlah target pekerja bukan penerima upah dan atau pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan) x 100 %	%	40,55	40,70	41,00	Indikator baru
7	Persentase Pencapaian sasaran pembangunan industri daerah, meliputi: 1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota; 2. Kontribusi sektor industri pengolahan nonmigas terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota; 3. Jumlah tenaga kerja sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota; 4. Nilai ekspor sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota 5. Nilai investasi sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota	Pencapaian dari setiap sasaran pembangunan industri daerah dihitung dengan cara membandingkan antara target yang ada dalam dokumen perencanaan pembangunan industri daerah tahunan	%	97,25	100	100	Indikator baru

Tabel 5.2
Indikator Kinerja Kunci Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

No	Indikator	Definisi Operasional/Rumus	Satuan	Capaian 2025	Target 2027	Target 2030	Keterangan
8	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan)	(Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak / Jumlah perusahaan) x 200 %	%	91,71	94,07	94,92	Indikator baru
9	Persentase realisasi investasi sektor industri dibandingkan realisasi investasi seluruh sektor	(Jumlah investasi sektor industri / Total investasi seluruh sektor) x 100 %	%	65,18	65,18	65,20	Indikator baru
10	Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi	Jml TK yang memiliki sertifikat kompetensi/jml total TK	%	1,02	100	100	
11	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kab/Kota	(Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan (Dalam & Luar Negeri) melalui Layanan Antar Kerja Kab/Kota / Jumlah Pencari Kerja Terdaftar di Kab/Kota) x 100%.	%	80,25	71,69	72,34	
12	Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah di Kab/Kota	((Jumlah IKM Tahun N - Jumlah IKM Tahun N-1) / Jumlah IKM Tahun N-1) x 100%,	%	0,49	0,55	0,7	Indikator baru
13	Rekapitulasi jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD dan jumlah kegiatan keseluruhan yang mengacu ke RTKD		%	100	100	100	Indikator baru
14	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Akumulasi dari kelengkapan dan keterkinian informasi industri	Ada/tidak	100	100	100	
15	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	(PDRB tahun berjalan atas dasar harga konstan/jumlah tenaga Kerja)x100%	Juta rp/TK	104,30	118,91	131,64	

BAB VI

PENUTUP

Hasil dari pemikiran strategis berupa rencana kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga tahun anggaran 2027 ini mencakup keputusan yang diambil berkaitan dengan nilai-nilai strategis, visi, misi dan strategi organisasi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga.

Agar dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan dapat berjalan dengan lancar, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga akan memfokuskan pada fungsi regulasi dan fasilitasi.

Selanjutnya rencana kerja ini agar dapat menjadi bahan Musyawarah Rencana Pembangunan Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2027 untuk menjadi masukan dan perbaikan Rancangan RKPD Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2027.

Demikian Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2027 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

WALI KOTA SALATIGA,



ROBBY HERNAWAN

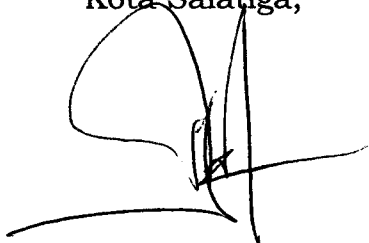
LAMPIRAN

**BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KOTA SALATIGA
TAHUN 2027**

Pada hari ini Selasa tanggal 28 bulan Juli tahun dua ribu dua puluh enam, telah dilaksanakan verifikasi terhadap rancangan akhir Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, dengan hasil sebagai berikut :

- Kesatu : sistematika penulisan Renja berpedoman dengan ketentuan pada pasal 129 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Permendagri No 14 Tahun 2026, paling sedikit memuat 6 (enam) bab yaitu:
1. Pendahuluan;
 2. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;
 3. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
 4. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;
 5. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan;
 6. Penutup.
- Kedua : melakukan penyempurnaan rancangan Renja Tahun 2027 berdasarkan hasil verifikasi, meliputi penyempurnaan rancangan akhir Renja sesuai saran dan masukan Tim sebagaimana tersebut pada formulir verifikasi terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini;
- Ketiga : menyampaikan perbaikan hasil verifikasi dalam bentuk dokumen Renja Tahun 2027 kepada Kepala BAPPEDA Kota Salatiga paling lambat 2 minggu setelah Perkada RKPD di tetapkan.

Kepala Dinas Perindustrian
dan Tenaga Kerja
Kota Salatiga,



AGUNG HENDRATMIKO, ST, MT, MSi
NIP. 19710904 199703 1 002

Koordinator Tim Verifikasi
Bidang Perencanaan Ekonomi dan
Pembangunan BAPPEDA
Kota Salatiga



JOKO PRASETYO., S.T., M.T.
NIP. 19761023 200502 1 007



PEMERINTAH KOTA SALATIGA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Jl. Ki Penjawi Nomor 12 Salatiga Kode Pos 50714 Telp. (0298) 313492
Faks. (0298) 313492 Situs <https://disperinnaker.salatiga.go.id>
Surat elektronik disperinnaker@salatiga.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

KOTA SALATIGA

Nomor : 900/552

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

KOTA SALATIGA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penetapan pedoman untuk arah pembangunan secara terarah, berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan, perlu disusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Salatiga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali, terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Presiden Nomor 79 tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak- Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Salatiga;

11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2023-2043 ;
12. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2025-2045;
13. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga Tahun 2025-2029;
14. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 124 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dengan data sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini, bertugas:
- a. Menyiapkan dokumen Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
 - b. Melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Wali Kota.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salatiga

Pada tanggal, 31 Juli 2026

KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KOTA SALATIGA,



AGUNG HENDRATMIKO

Tembusan:

1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Salatiga;
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Salatiga;
3. Segenap Anggota Tim.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KOTA SALATIGA

NOMOR : 900/552

TANGGAL : 31 Juli 2026

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA SALATIGA

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2	Sekretaris Dinas	Ketua
3	Kepala Bidang Perindustrian	Wakil Ketua
4	Kepala Bidang Tenaga Kerja	Sekretaris
5	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
6	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Anggota
7	Fungsional Penyuluh Perindag	Anggota
8	Fungsional Mediator Hubungan Industrial	Anggota
9	Fungsional Pengantar Kerja	Anggota
10	Staf pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Anggota

KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KOTA SALATIGA



AGUNG HENDRATMIKO

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 Kota Salatiga

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2027	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2025			Target program , kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026	
1					2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Prosentase Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi	%	0,00	80,0	100	205	205,00	100	0,00	0,00
						Prosentase Tenaga Kerja yang bersertifikat kompetensi	%	0,04	100,00	100	1,00	1,00	0,04	0,00	0,00
2	07	03	2,01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang terlatih	orang	112	550	80	112	140,00	319	112,00	1,00
2	07	03	2,01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	orang	112	550	80	112	140,00	319	112,00	1,00
2	07	03	2,02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	%	100	100	100	100	100,00	100	100,00	1,00
2	07	03	2,02	01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	lembaga	27	25	26	25	96,15	26	26,00	0,96
2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase realisasi kegiatan bursa tenaga kerja	%	100	103,33	100	103,00	103,00	100	0,00	0,00
2	07	04	2,01		Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pelayanan antar kerja	%	-	-	-	-	-	-	-	0,00
2	07	04	2,01	01	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja, Pelayanan Antar Kerja	Tersedianya SDM pelayanan antar kerja (pengantar kerja dan petugas antar kerja)	orang	-	-	-	-	-	-	-	0,00
2	07	04	2,01	02	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya pelayanan antar kerja		-	-	-	-	-	-	25,00	0,00
2	07	04	2,03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Terlaksasnanya Job Fair	%	100	100	100	100	100,00	100	100,00	1,00
2	07	04	2,03	03	Job Fair/Bursa Kerja (Dinas Perindustrian danTenaga Kerja)	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan	orang	349	259	116	2,37	2,04	319	319,00	0,91
2	07	04	2,04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi CPMI/PMI	%	100	11,11	100	-17,86	-17,86	100	9,68	0,10
2	07	04	2,04	01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Persentase CPMI/PMI yang mendapatkan perlindungan	%	100	100	100	100	100,00	100	0,00	0,00
2	07	04	2,05		Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerjadalam 1 (satu) Daerah	Persentase Tenaga Kerja Asing Yang memiliki izin	%	100	100	100	100	100,00	100	100,00	1,00
2	07	04	2,05	01	Koordinasi danSinkronisasiPerpanjangan IMTA yangLokasi Kerja dalam 1(Satu) DaerahKabupaten/Kota (Dinas Perindustrian danTenaga Kerja)	Terlaksananya Pendataan dan Monev Tenaga Kerja Asing (TKA)	perusahaann	16	16	16	16	100,00	16	0,00	0,00
2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial	%	0,00	100,00	100	73,68	73,68	37	0,00	0,00
						Prosentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan	%	94,44	93,24	93,66	91,71	97,92	93,71	93,71	0,99

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2027	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2025			Target program , kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025 TW 3	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	07	05	2,01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial	kasus	15	17	11	17	154,55	15	15,00	1,00
2	07	05	2,01	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan (Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja)	Persentase Pekerja yang telah Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	%	98,00	92,08	96	91,15	94,95	98	0,00	0,00
2	07	05	2,02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota	Pesentase Angka Perselisihan pengusaha-pekerja yang diselesaikan secara Perjanjian Bersama (PB)	%	100,00	94,44	100	82,35	82,35	100	100,00	1,00
2	07	05	2,02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota (Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja)	Persentase perusahaan yang berpartisipasi dalam menciptakan Hubungan Industrial	%	0,00	21,73	35	45,24	129,26	40	0,00	0,00
2	07	05	2,02	04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase LKS Bipartit yang Dibina	%	0,00	15,38	30	31	101,87	35	0,00	0,00
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN									0,00	
3	31	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	89,28	88,78	88,88	88,31	99,36	89,03	89,03	1,00
3	31	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi capaian kinerja	dokumen	6	6	6	6	100,00	6	18,00	3,00
3	31	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah Tersedianya dokumen perencanaan	dokumen	6	6	6	6	100,00	6	1,00	0,17
3	31	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terbayarnya gaji dan tunjangan bagi PNS serta pengelola	%	100	100	100	100	100,00	100	100,00	1,00
3	31	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Terbayarnya gaji dan tunjangan bagi PNS	orang	27	27	27	27	100,00	27	27,00	1,00
3	31	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Terbayarnya honorarium pengelola keuangan perangkat daerah	dokumen	1	1	1	1	100,00	1	1,00	1,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2027	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2025			Target program , kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025 TW 3	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2				3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3 31 01 2,03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				Keamanan Barang Milik daerah pada perangkat daerah	tahun	1	1	1	1	100,00	1	1,00	1,00
3 31 01 2,03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja)				Jaminan keamanan kendaraan roda 4 perangkat daerah Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	tahun	1	1	1	1	100,00	1	1,00	1,00
3 31 01 2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				Ketersediaan logistik dan kebutuhan perkantoran	tahun	1	1	1	1	100,00	1	1,00	1,00
3 31 01 2,06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja)				Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	tahun	1	1	1	1	100,00	1	1,00	1,00
3 31 01 2,06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja)				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Tersedianya sarana prasarana kebersihan kantor	tahun	1	1	1	1	100,00	1	1,00	1,00
3 31 01 2,06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja)				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	tahun	1	1	1	1	100,00	1	1,00	1,00
3 31 01 2,06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja)				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	tahun	1	1	1	1	100,00	1	1,00	1,00
3 31 01 2,06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja)				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	0	0	0	0	#DIV/0!	0	1,00	0,00
3 31 01 2,06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu (Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja)				Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	dokumen	1	1	1	1	100,00	1	1,00	1,00
3 31 01 2,06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja)				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	dokumen	1	1	1	1	100,00	1	1,00	1,00
3 31 01 2,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Jasa penunjang perkantoran	tahun	1	1	1	1	100,00	1	1,00	1,00
3 31 01 2,08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja)				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	dokumen	1	1	1	1	100,00	1	1,00	1,00
3 31 01 2,08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	dokumen	1	1	1	1	100,00	1	1,00	1,00
3 31 01 2,08 03	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	dokumen	1	1	1	1	100,00	1	1,00	1,00
3 31 01 2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Keamanan Barang Milik daerah pada perangkat daerah	tahun	1	1	1	1	100,00	1	1,00	
3 31 01 2,09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan/Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	tahun	1	1	1	1	100,00	1	21,00	21,00
3 31 01 2,09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	tahun	1	1	1	1	100,00	1	235,00	235,00
3 31 01 2,09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	tahun	1	1	1	1	100,00	1	1,00	1,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2027	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2025			Target program , kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025 TW 3	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2					3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3 31 01 2,09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	tahun	1	1	1	1	100,00	1	288,00	288,00
3 31 02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					Prosentase industri kota salatiga yang berkembang	%	0,88	0,31	0,38	0,31	81,58	0,44	0,31	0,35
3 31 02 2,01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri					Terlaksananya Pengembangan Industri Kota Salatiga	%	33,44	31,05	31,1	31,05	99,84	33,29	33,29	1,00
3 31 02 2,01 04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja)					Cakupan IKM yang dibina (melalui pelatihan, pendampingan, sosialisasi dan fasilitasi	%	0	17,92	5	0,09	1,80	5	0,00	0,00
3 31 02 2,01 05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat					Jumlah klaster industri yang Jumlah produk IKM yg telah terpromosikan di pasar lokal/regional/ nasional	klaster produk	0 0	2 46	2 20	2 41	100,00 205,00	3 20	0,00 107,00	0,00 107,00
3 31 03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA					Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah	%	23,08	100	100	9,54	9,54	100	20,00	0,87
						Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang	%	3,53	0	1,41	0,00	0,00	1	2,47	0,70
3 31 03 2,01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/ Kota					Jumlah Izin Industri yang diterbitkan	izin	8	8	6	0	0,00	6	8,00	1,00
3 31 03 2,01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI,IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri,Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri KewenanganKabupaten/Kota	dokumen	1	1	1	0	0,00	1	1,00	1,00
3 31 03	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					Persentase Jumlah usaha industri yang memiliki akun SIINas dan melaporkan data industri	%	0,00	12,97	13,3	16,87	126,84	6	0,00	0,00
3 31 03 2,01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKIKewenangan Kabupaten/ Kota					Terlaksananya Sosialisasi SIINas	%	100	100	100	100,00	100,00	100	100,00	1,00

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2027	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2025			Target program , kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026	
											Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025 TW 3	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3	31	03	2,01	01		Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	dokumen	1	1	1	0	0,00	1	1,00	1,00
3	32	03				PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN	Persentase Pelaksanaan Proses Transmigrasi	%	60	20	100	40	40,00	100	60,00	1,00
3	32	03	2,01			Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah transmigran yang diberangkatkan ke lokasi transmigrasi	KK	2	0	2	1	50,00	2	2,00	1,00
3	32	03	2,01	01		Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	1	1	1	1	100,00	1	1,00	1,00
3	32	03	2,01	05		Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	orang	90	5	90	9	10,00	90	90,00	1,00

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga

NO	INDIKATOR	SPM / STANDAR NASIONAL	IKK /IKU	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2025 (n-2)	Perkiraan Th 2026 (n-1)	Tahun 2027 (n)	Tahun 2028 (n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	URUSAN TENAGA KERJA											
1	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	-	IUP/IKD	4,49-4,19	4,50-4,42	4,42-4,34	4,35-4,27	3,67%	4,50-4,42	4,42-4,34	4,35-4,27	-
2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	-	IKU/IKD	69,97%	70,10%	71,27%	71,52%	70,93%	70,10%	71,27%	71,52%	-
3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	-	IUP	65,18%	66,74%	67,52%	68,30%	61,65%	66,74%	67,52%	68,30%	indikator baru
4	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	-	IKK	98,40%	99,72%	118,91%	123,15%	104,30%	99,72%	118,91%	123,15%	-
5	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	-	-	50%	50%	-	-	79,38%	50%	-	-	-
6	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kab/Kota	-	IKK	71,26%	71,48%	71,69%	71,91%	80,25%	71,48%	71,69%	71,91%	indikator baru
7	Persentase lembaga pelatihan kerja swasta (LPKS) memiliki izin	-	-	90%	100%	-	-	68,00%	100%	-	-	-
8	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja	-	IKK	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-
9	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja		IUP/IKD	51,76%	54%	56,24%	58,47%	67,01%	54%	56,24%	58,47%	indikator baru
10	Pertumbuhan Produktivitas Tenaga Kerja		IKU	5,25%	5,32%	5,39%	5,46%	5,18%	5,32%	5,39%	5,46%	indikator baru
11	Tingkat Kesempatan Kerja		IKU	97,01%	97,88%	98,75%	99,62%	96,32	97,88%	98,75%	99,62%	indikator baru
12	Prosentase Tenaga Kerja yang bersertifikat kompetensi	-	IKK	100,00%	100%	100%	100%	1,00%	100%	100%	100%	
13	Prosentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan	-	IKK	93,51%	93,79%	94,07%	94,35%	46,47%	93,79%	94,07%	94,35%	
14	Prosentase Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	-	-	70%	100%	100%	-	205%	100%	100%	-	-
15	Persentase realisasi kegiatan bursa tenaga kerja	-	-	100%	100%	100%	-	103%	100%	100%	-	
16	Persentase penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial	-	-	35%	37%	37%	-	73,68%	37%	37%	-	
17	Persentase Tenaga Kerja yang Terlatih			-	0,31%	0,34%	0,36%	1,02%	0,31%	0,34%	0,36%	indikator baru
	URUSAN PERINDUSTRIAN											
1	Persentase Pertumbuhan IKM	-	-	0,43%	0,49%	-	-	0,55%	0,49%	-	-	-
2	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	-	IKU	33,33%	33,91%	34,20%	34,49%	33,10%	33,91%	34,20%	34,49%	-
3	Rasio PDRB Industri pengolahan		IUP/IKD	31,10%	34,32%	34,60%	34,89%	33,10%	34,32%	34,60%	34,89%	-

NO	INDIKATOR	SPM / STANDAR NASIONAL	IKK /IKU	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2025 (n-2)	Perkiraan Th 2026 (n-1)	Tahun 2027 (n)	Tahun 2028 (n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Persentase jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang diterbitkan		IKU	100%	100%	100%	100%	75,57	100%	100%	100%	indikator baru
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait		IKU	100%	100%	100%	100%	9,54%	100%	100%	100%	
6	Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah di Kab/Kota	-	IKK	0,48%	0,50%	0,55%	0,60%	0,49%	0,50%	0,55%	0,60%	indikator baru
7	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN (Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional) yang ditetapkan dalam RPIK (Rencana Pembangunan Industri Kota)		IKK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	indikator baru
8	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait		IKK	100%	100%	100%	100%	0	100%	100%	100%	
9	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kota		IKK	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini		IKK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
11	Prosentase industri kota salatiga yang berkembang	-	-	0,56%	0,75%	0,75%	-	0,31%	0,75%	0,75%	-	
12	Persentase Jumlah usaha industri yang memiliki akun SIINAS dan melaporkan data industri	-	-	5,60%	6,00%	6%	-	16,87%	6,00%	6%	-	
URUSAN TRANSMIGRASI												
1	Prosentase peminat transmigrasi	-	IKU	4,07%	4,60%	20,00%	20,00%	88,89%	4,60%	20,00%	20,00%	-
2	Prosentase Peningkatan Peminat Transmigrasi	-	-	4,80%	6,09%	6,09%	-	700,00%	6,09%	6,09%	-	-
3	Persentase Pelaksanaan Proses Transmigrasi	-	-	75%	100%	100%	-	40%	100%	100%	-	

Tabel 2.3
Review Terhadap Renstra Tahun 2027
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga

No	RENSTRA DINAS PERINNAKER TAHUN 2027					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TAHUN 2027					Catatan Penting
	Program / kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (000)	Program / kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Salatiga	Persentase Tenaga Kerja yang Terlatih	0%	656.333.452	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Salatiga	Persentase Tenaga Kerja yang Terlatih	0%	656.333.452	
1	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Salatiga	Jumlah Tenaga Kerja yang terlatih	112 orang	625.333.452	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Salatiga	Jumlah Tenaga Kerja yang terlatih	112 orang	625.333.452	
a	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Salatiga	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	112 orang	625.333.452	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Salatiga	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	112 orang	625.333.452	.
2	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Salatiga	Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dibina	100%	31.000.000	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Salatiga	Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dibina	100%	31.000.000	
a	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (Dinas Perindustrian dan	Salatiga	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	27 lembaga	31.000.000	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (Dinas Perindustrian dan	Salatiga	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	27 lembaga	31.000.000	
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Salatiga	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kab/Kota	82,66%	451.025.733	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Salatiga	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kab/Kota	82,66%	451.025.733	
1	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Salatiga	Terwujudnya Pelayanan Antar Kerja	25 orang	58.923.900	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Salatiga	Terwujudnya Pelayanan Antar Kerja	25 orang	58.923.900	
a	Sub Kegiatan Pelayanan Antar Kerja	Salatiga	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan Melalui layanan AKAD, AKL dan ULD	50 orang	58.923.900	Sub Kegiatan Pelayanan Antar Kerja	Salatiga	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan Melalui layanan AKAD, AKL dan ULD	50 orang	58.923.900	
2	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Salatiga	Terlaksananya Job Fair	100%	329.101.833	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Salatiga	Terlaksananya Job Fair	100%	329.101.833	
a	Job Fair/ Bursa Kerja (Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja)	Salatiga	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan melalui Job Fair/Bursa Kerja	349 orang	302.101.833	Job Fair/ Bursa Kerja (Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja)	Salatiga	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan melalui Job Fair/Bursa Kerja	349 orang	302.101.833	
b	Sub Kegiatan Pemeliharaan dan operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja	Salatiga	Terpeliharanya aplikasi	100%	27.000.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan dan operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Salatiga	Terpeliharanya aplikasi	100%	27.000.000	
3	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah	Salatiga	Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi CPMI/PMI	10,29%	35.000.000	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah	Salatiga	Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi CPMI/PMI	10,29%	35.000.000	

No	RENSTRA DINAS PERINNAKER TAHUN 2027					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TAHUN 2027					Catatan Penting
	Program / kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (000)	Program / kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
a	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Salatiga	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	74 orang	35.000.000	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Salatiga	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	74 orang	35.000.000	
4	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Salatiga	Persentase Tenaga Kerja Asing Yang memiliki izin	100%	28.000.000	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Salatiga	Persentase Tenaga Kerja Asing Yang memiliki izin	100%	28.000.000	
a	2.07.04.3.05.0002 Sub Kegiatan Validasi Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) untuk Pengesahan RPTKA	Salatiga	Jumlah Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) untuk Pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi dalam 1 (satu) kabupaten/kota Yang Divalidasi	37 SKRD	28.000.000	2.07.04.3.05.0002 Sub Kegiatan Validasi Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) untuk Pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi dalam 1 (satu) kabupaten/kota Yang Divalidasi	Salatiga	Jumlah Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) untuk Pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi dalam 1 (satu) kabupaten/kota Yang Divalidasi	37 SKRD	28.000.000	
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Salatiga	Prosentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan	94,44%	677.716.443	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Salatiga	Prosentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan	94,44%	677.716.443	
1	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Salatiga	Penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial	11 kasus	71.371.600	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Salatiga	Penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial	11 kasus	71.371.600	
a	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan (Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja)	Salatiga	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	1 laporan	71.371.600	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan (Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja)	Salatiga	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	1 laporan	71.371.600	

No	RENSTRA DINAS PERINNAKER TAHUN 2027					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TAHUN 2027					Catatan Penting
	Program / kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (000)	Program / kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	<i>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Salatiga</i>	<i>Pesentase Angka Perselisihan pengusaha-pekerja yang diselesaikan secara Perjanjian Bersama (PB)</i>	<i>100%</i>	<i>606.344.843</i>	<i>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Salatiga</i>	<i>Pesentase Angka Perselisihan pengusaha-pekerja yang diselesaikan secara Perjanjian Bersama (PB)</i>	<i>100%</i>	<i>606.344.843</i>	
a	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja)	Salatiga	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 lembaga	88.141.739	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja)	Salatiga	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 lembaga	88.141.739	
b	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial , Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Salatiga	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	15 perkara	241.278.104	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial , Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Salatiga	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	15 perkara	241.278.104	
c	Sub Kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Salatiga	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	5335 orang	276.925.000	Sub Kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Salatiga	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	5335 orang	276.925.000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Salatiga	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	100,00%	15.821.778.261	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Salatiga	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	100,00%	15.971.778.261	
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	89,28%				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	89,28%		
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75,20%				Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75,20%		
1	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Salatiga</i>	<i>Tersedianya dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi capaian kinerja</i>	<i>6 dokumen</i>	<i>30.500.000</i>	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Salatiga</i>	<i>Tersedianya dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi capaian kinerja</i>	<i>6 dokumen</i>	<i>30.500.000</i>	

No	RENSTRA DINAS PERINNAKER TAHUN 2027					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TAHUN 2027					Catatan Penting
	Program / kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (000)	Program / kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
a	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Salatiga	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen	5.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Salatiga	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen	5.500.000	
b	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Salatiga	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat daerah	2 data	25.000.000	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Salatiga	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat daerah	2 data	25.000.000	
2	Admistrasi Keuangan Perangkat Daerah	Salatiga	Terbayarnya gaji dan tunjangan bagi PNS serta pengelola Keuangan	1 tahun	5.389.471.287	Admistrasi Keuangan Perangkat Daerah	Salatiga	Terbayarnya gaji dan tunjangan bagi PNS serta pengelola Keuangan	1 tahun	5.389.471.287	
a	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Salatiga	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 orang	4.906.000.000	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Salatiga	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 orang	4.906.000.000	
b	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Salatiga	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	483.471.287	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Salatiga	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	483.471.287	
3	Administasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Salatiga	Keamanan Barang Milik daerah pada perangkat daerah	1 tahun	55.000.000	Administasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Salatiga	Keamanan Barang Milik daerah pada perangkat daerah	1 tahun	55.000.000	
a	Pengamaan barang milik daerah SKPD	Salatiga	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	55.000.000	Pengamaan barang milik daerah SKPD	Salatiga	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	55.000.000	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Salatiga	Ketersediaan logistik dan kebutuhan perkantoran	1 tahun	348.095.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Salatiga	Ketersediaan logistik dan kebutuhan perkantoran	1 tahun	348.095.000	
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Salatiga	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	11.495.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Salatiga	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	11.495.000	
b	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Salatiga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	38.500.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Salatiga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	38.500.000	
c	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Salatiga	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	60.500.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Salatiga	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	60.500.000	
d	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Salatiga	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	8.800.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Salatiga	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	8.800.000	

No	RENSTRA DINAS PERINNAKER TAHUN 2027					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TAHUN 2027					Catatan Penting
	Program / kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (000)	Program / kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
e	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Salatiga	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0	-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Salatiga	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0	-	
f	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Salatiga	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 tahun	8.800.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Salatiga	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 tahun	8.800.000	
g	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Salatiga	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 tahun	220.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Salatiga	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 tahun	220.000.000	
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Salatiga	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		9.367.311.975	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Salatiga	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		9.367.311.975	
a	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Salatiga	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Laptop 1, printer 5, mesin absensi 1, Peralatan Pelatihan TIK, Peralatan Pelatihan Menjahit, Peralatan Pelatihan tata Rias Kecantikan, Peralatan Pelatihan Roti Kue, LCD Proyektor)	5 unit	55.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Salatiga	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Laptop 1, printer 5, mesin absensi 1, Peralatan Pelatihan TIK, Peralatan Pelatihan Menjahit, Peralatan Pelatihan tata Rias Kecantikan, Peralatan Pelatihan Roti Kue, LCD Proyektor)	5 unit	55.000.000	
b	Pengadakan gedung kantor atau bangunan lainnya	Salatiga	Tersedianya gedung kantor atau bangunan lainnya	1 unit	9.312.311.975	Pengadakan gedung kantor atau bangunan lainnya	Salatiga	Tersedianya gedung kantor atau bangunan lainnya	1 unit	9.312.311.975	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Salatiga	Jasa penunjang perkantoran	1 tahun	111.100.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Salatiga	Jasa penunjang perkantoran	1 tahun	261.100.000	
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Salatiga	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	1.100.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Salatiga	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	1.100.000	
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Salatiga	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	110.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Salatiga	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	110.000.000	
c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Salatiga	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Salatiga	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	150.000.000	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Salatiga	Tersedianya Keamanan Barang Milik daerah pada perangkat daerah	1 tahun	520.299.999	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Salatiga	Tersedianya Keamanan Barang Milik daerah pada perangkat daerah	1 tahun	520.299.999	

No	RENSTRA DINAS PERINNAKER TAHUN 2027					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TAHUN 2027					Catatan Penting
	Program / kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (000)	Program / kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Salatiga	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21 unit	113.300.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Salatiga	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21 unit	113.300.000	
b	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Salatiga	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	235 unit	66.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Salatiga	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	235 unit	66.000.000	
c	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Salatiga	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	286.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Salatiga	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	286.000.000	
d	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Salatiga	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	288 unit	54.999.999	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Salatiga	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	288 unit	54.999.999	
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Salatiga	Prosentase industri kota salatiga yang berkembang	0,88%	510.825.404	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Salatiga	Prosentase industri kota salatiga yang berkembang	0,88%	510.825.404	
1	<i>Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota</i>	<i>Salatiga</i>	<i>Terlaksananya Pengembangan Industri Kota Salatiga</i>	<i>33,44%</i>	<i>510.825.404</i>	<i>Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota</i>	<i>Salatiga</i>	<i>Terlaksananya Pengembangan Industri Kota Salatiga</i>	<i>33,44%</i>	<i>510.825.404</i>	
a	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja)	Salatiga	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 dokumen	38.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja)	Salatiga	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 dokumen	38.000.000	perubahan indikator bdsk permendagri 900
b	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Salatiga	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 dokumen	472.825.404	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Salatiga	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 dokumen	472.825.404	n indikator bdsk permendagri 900
	PROGRAM PENGENDALIAN IJIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN /KOTA	Salatiga	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	23,08%	18.454.364	PROGRAM PENGENDALIAN IJIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN /KOTA	Salatiga	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	23,08%	18.454.364	

No	RENSTRA DINAS PERINNAKER TAHUN 2027					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TAHUN 2027					Catatan Penting
	Program / kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (000)	Program / kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	3,53%				Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	3,53%		
1	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/ Kota	Salatiga	Jumlah Izin Industri yang diterbitkan	6 izin	18.454.364	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/ Kota	Salatiga	Jumlah Izin Industri yang diterbitkan	6 izin	18.454.364	
a	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Salatiga	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/ Kota	1 dokumen	18.454.364	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Salatiga	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/ Kota	1 dokumen	18.454.364	
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Salatiga	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	100,00%	77.026.909	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Salatiga	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	100,00%	77.026.909	
1	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Salatiga	Terlaksananya Sosialisasi SIINas	100%	77.026.909	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Salatiga	Terlaksananya Sosialisasi SIINas	100%	77.026.909	
a	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Salatiga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 dokumen	77.026.909	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Salatiga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 dokumen	77.026.909	
	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Salatiga	Persentase Pelaksanaan Proses Transmigrasi	60%	98.690.727	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Salatiga	Persentase Pelaksanaan Proses Transmigrasi	60%	98.690.727	

No	RENSTRA DINAS PERINNAKER TAHUN 2027					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TAHUN 2027					Catatan Penting
	Program / kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (000)	Program / kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Salatiga	Jumlah transmigran yang diberangkatkan ke lokasi transmigrasi	2 KK	98.690.727	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Salatiga	Jumlah transmigran yang diberangkatkan ke lokasi transmigrasi	2 KK	98.690.727	
a	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Salatiga	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	68.690.727	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Salatiga	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	68.690.727	
b	Penyuluhan transmigrasi	Salatiga	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	90 orang	30.000.000	Penyuluhan transmigrasi	Salatiga	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	90 orang	30.000.000	
TOTAL PAGU					18.311.851.293					18.461.851.293	

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2027
Kota Salatiga

Unit Perangkat Daerah: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
NIHIL					Usulan program kegiatan dari pemangku kepentingan diperoleh melalui musrenbang kelurahan maupun kecamatan. Pada saat dokumen ini di susun kegiatan musrenbang belum dilaksanakan sehingga belum dilakukan analisis usulan kegiatan dengan program yang dilaksanakan di kecamatan

Tabel 3.1
Dukungan Program dan Kegiatan Daerah terhadap Prioritas Nasional

No	Prioritas Nasional	Program	Aktivitas
1	Peningkatan Kualitas SDM dan Penciptaan Lapangan Kerja	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga kerja	Perencanaan dan Persiapan Pelatihan
			Pelaksanaan Pelatihan Kerja
			Sertifikasi Kompetensi
			Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja
			Penempatan dan Layanan Pasca Pelatihan
			Evaluasi dan Pelaporan
2	Penguatan Ketahanan Sosial, Budaya, dan Lapangan Kerja	Program Penempatan Tenaga Kerja	Perencanaan & Pengelolaan Layanan Penempatan
			Pelayanan Antar Kerja (AKAD / Job Matching)
			Fasilitasi Rekrutmen
			Bursa Kerja / Job Fair
			Penempatan Tenaga Kerja Dalam & Luar Negeri
			Layanan Informasi Pasar Kerja (IPK)
			Penguatan Kelembagaan Layanan Penempatan
			Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan
		Program Hubungan Industrial	Pembinaan Hubungan Industrial
			Penguatan Kelembagaan Hubungan Industrial
			Pengupahan
			Penyusunan & Pendaftaran Peraturan Perusahaan (PP) / Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
			Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
			Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
			Hubungan Kerja & Norma Kerja
			Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan
		Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Perencanaan dan Seleksi Calon Transmigran
			Pembekalan Pra-Pemberangkatan
			Pengurusan Administrasi Pemberangkatan
			Fasilitasi Logistik dan Transportasi
			Pendampingan Teknis Selama Pemberangkatan
			Koordinasi Penerimaan di Daerah Tujuan
			Monitoring dan Evaluasi Pasca Pemberangkatan
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Industri
			Pengembangan Kawasan dan Sentra Industri
			Pembinaan dan Fasilitasi Industri
			Pengembangan SDM dan Kelembagaan Industri
			Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM)
			Penumbuhan dan Pengembangan Wirausaha Industri Baru
			Pengawasan dan Tata Kelola Industri
			Pengumpulan Data dan Informasi Industri
			Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan
		Program Pengendalian Ijin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Perencanaan & Pengelolaan Layanan Perizinan
			Pelayanan Perizinan Usaha Industri
			Pengendalian dan Pengawasan Industri Berizin
			Penegakan Kepatuhan & Penanganan Pelanggaran
			Pembinaan dan Edukasi Pelaku Industri
			Pengembangan Sistem Informasi Perizinan Industri
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan
			Pendataan dan Pemutakhiran Data Industri
			Fasilitasi Pelaporan Industri Melalui SIINas
			Validasi dan Pengawasan Data SIINas
			Pengembangan dan Integrasi Sistem Informasi Industri
			Pembinaan dan Edukasi Pelaku Industri
			Koordinasi dan Kolaborasi Antar Instansi
			Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

Tabel 3.2
Dukungan Program dan Kegiatan Daerah terhadap Prioritas Provinsi

No	Prioritas Provinsi	Program	Aktivitas
1	Peningkatan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga kerja	Perencanaan dan Persiapan Pelatihan
			Pelaksanaan Pelatihan Kerja
			Sertifikasi Kompetensi
			Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja
			Penempatan dan Layanan Pasca Pelatihan
			Evaluasi dan Pelaporan
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Perencanaan & Pengelolaan Layanan Penempatan
			Pelayanan Antar Kerja (AKAD / Job Matching)
			Fasilitasi Rekrutmen
			Bursa Kerja / Job Fair
			Penempatan Tenaga Kerja Dalam & Luar Negeri
			Layanan Informasi Pasar Kerja (IPK)
			Penguatan Kelembagaan Layanan Penempatan
			Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan
		Program Hubungan Industrial	Pembinaan Hubungan Industrial
			Penguatan Kelembagaan Hubungan Industrial
			Pengupahan
			Penyusunan & Pendaftaran Peraturan Perusahaan (PP) / Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
			Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
			Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
			Hubungan Kerja & Norma Kerja
			Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan
		Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Perencanaan dan Seleksi Calon Transmigran
			Pembekalan Pra-Pemberangkatan
			Pengurusan Administrasi Pemberangkatan
			Fasilitasi Logistik dan Transportasi
			Pendampingan Teknis Selama Pemberangkatan
			Koordinasi Penerimaan di Daerah Tujuan
			Monitoring dan Evaluasi Pasca Pemberangkatan
2	Peningkatan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berbasis Lingkungan	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Industri
			Pengembangan Kawasan dan Sentra Industri
			Pembinaan dan Fasilitasi Industri
			Pengembangan SDM dan Kelembagaan Industri
			Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM)
			Penumbuhan dan Pengembangan Wirausaha Industri Baru
			Pengawasan dan Tata Kelola Industri
			Pengumpulan Data dan Informasi Industri
			Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan
		Program Pengendalian Ijin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Perencanaan & Pengelolaan Layanan Perizinan
			Pelayanan Perizinan Usaha Industri
			Pengendalian dan Pengawasan Industri Berizin
			Penegakan Kepatuhan & Penanganan Pelanggaran
			Pembinaan dan Edukasi Pelaku Industri
			Pengembangan Sistem Informasi Perizinan Industri
			Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Pendataan dan Pemutakhiran Data Industri
			Fasilitasi Pelaporan Industri Melalui SIINas
			Validasi dan Pengawasan Data SIINas
			Pengembangan dan Integrasi Sistem Informasi Industri
			Pembinaan dan Edukasi Pelaku Industri
			Koordinasi dan Kolaborasi Antar Instansi
			Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

Tabel 3.3
Tujuan dan Sasaran Renja

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Definisini Operasional/Rumus	Satuan	Capaian 2025	Target 2027	Target 2030
1	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja dan kontribusi sektor industri terhadap pertumbuhan ekonomi		Pertumbuhan Produktivitas Tenaga Kerja	(Produktivitas Tahun N - Produktivitas tahun (N-1)) dibagi Produktivitas Tahun N-1) x 100%	%	5,18	5,39	5,6
			Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	(jumlah kontribusi PDRB sektor Industri/ Jumlah PDRB) x 100%	%	33,1	34,2	35,06
		Meningkatnya Partisipasi angkatan kerja dan penyerapan tenaga kerja di pasar tenaga kerja	Tingkat Kesempatan Kerja	(Penduduk Bekerja dibagi Angkatan Kerja) x 100%	%	96,32	98,75	101,37
		Meningkatnya pertumbuhan industri kecil dan menengah	Persentase jumlah izin usaha industri (IUI) Kecil dan IUI Menengah yang diterbitkan	(jumlah IUI yang diterbitkan/Jumlah permohonan pengajuan izin IUI yang masuk) x 100%	%	75,57	100	100
		Meningkatnya minat transmigrasi	Persentase peminat transmigrasi	Jumlah calon transmigran yang berminat dibagi peserta penyuluhan calon transmigran dikali 100%	%	88,89	20	20

Tabel 3.4
Indikator Kinerja Kunci Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

No	Indikator	Definisi Operasional/Rumus	Satuan	Capaian 2025	Target 2027	Target 2030	Keterangan
1	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh	Jumlah izin IPUI Kecil dan Menengah yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan/Jumlah izin yang dikeluarkan) * 100%	%	0	100	100	
2	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin IUI Kecil Menengah yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan/Jumlah izin yang dikeluarkan) * 100%	%	9,54	100	100	
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kota	Jumlah izin IUKI dan IPKI yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan/Jumlah izin yang dikeluarkan) * 100%	%	0	0	0	
4	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	(Jumlah kegiatan yang sesuai rencana tenaga kerja / Jumlah kegiatan keseluruhan yang direncanakan) x 100%	%	100	100	100	
5	Persentase Kepatuhan pelaku usaha industri kecil dan menengah yang melaporkan informasi melalui sisten informasi industri nasional	(Jumlah pelaku usaha industri kecil dan menengah yang melaporkan informasi industri melalui sistem SIINAS / Jumlah seluruh pelaku usaha industri kecil dan menengah) x 100 %					Indikator baru
6	Persentase pekerja bukan penerima upah dan atau pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan	(Jumlah pekerja bukan penerima upah dan atau pekerja rentan yag mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan / Jumlah target pekerja bukan penerima upad dan atau pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan) x 100 %					Indikator baru
7	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN (Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional) yang ditetapkan dalam RPIK (Rencana Pembangunan Industri Kota)	Pencapaian dari setiap sasaran pembangunan industri daerah dihitung dengan cara membandingkan antara target yang ada dalam dokumen perencanaan pembangunan industri daerah tahunan yang disepakati dengan capaian pada akhir tahun tersebut	%	100	100	100	
8	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN (Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional) yang ditetapkan dalam RPIK (Rencana Pembangunan Industri Kota)						Indikator baru
9	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan)	(Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak / Jumlah perusahaan) x 200 %					Indikator baru
10	Persentase realisasi investasi sektor industri dibandingkan realisasi investasi seluruh sektor	(Jumlah investasi sektor industri / Total investasi seluruh sektor) x 100 %					Indikator baru
11	Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi	Jml TK yang memiliki sertifikat kompetensi/jml total TK	%	1,02	100	100	

12	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kab/Kota	(Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan (Dalam & Luar Negeri) melalui Layanan Antar Kerja Kab/Kota / Jumlah Pencari Kerja Terdaftar di Kab/Kota) x 100%.	%	80,25	71,69	72,34	
13	Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah di Kab/Kota	$((\text{Jumlah IKM Tahun N} - \text{Jumlah IKM Tahun N-1}) / \text{Jumlah IKM Tahun N-1}) \times$	%	0,49	0,55	0,7	
14	Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah di Kab/Kota						Indikator baru
15	Prosentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	(jml perusahaan yg menerapkan tata kelola yg layak/jumlah seluruh perusahaan)x100%	%	46,47	94,07	94,92	
16	Rekapitulasi jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD dan jumlah kegiatan keseluruhan yang mengacu ke RTKD						Indikator baru
17	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Akumulasi dari kelengkapan dan keterkinian informasi	Ada/tidak	100	100	100	
18	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	(PDRB tahun berjalan atas dasar harga konstan/jumlah tenaga Kerja)x100%	Juta rp/TK	104,30	118,91	131,64	

Tabel 3.5
Dukungan Program dan Kegiatan terhadap Prioritas Kota

No	Prioritas Kota	Program	Aktivitas
1	Meningkatkan kapasitas tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri dan pasar kerja	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga kerja	Perencanaan dan Persiapan Pelatihan
			Pelaksanaan Pelatihan Kerja
			Sertifikasi Kompetensi
			Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja
			Penempatan dan Layanan Pasca Pelatihan
			Evaluasi dan Pelaporan
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Perencanaan & Pengelolaan Layanan Penempatan
			Pelayanan Antar Kerja (AKAD / Job Matching)
			Fasilitasi Rekrutmen
			Bursa Kerja / Job Fair
			Penempatan Tenaga Kerja Dalam & Luar Negeri
			Layanan Informasi Pasar Kerja (IPK)
			Penguatan Kelembagaan Layanan Penempatan
			Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan
		Program Hubungan Industrial	Pembinaan Hubungan Industrial
			Penguatan Kelembagaan Hubungan Industrial
			Pengupahan
			Penyusunan & Pendaftaran Peraturan Perusahaan (PP) / Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
			Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
			Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
			Hubungan Kerja & Norma Kerja
			Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan
		Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Perencanaan dan Seleksi Calon Transmigran
			Pembekalan Pra-Pemberangkatan
			Pengurusan Administrasi Pemberangkatan
			Fasilitasi Logistik dan Transportasi
			Pendampingan Teknis Selama Pemberangkatan
			Koordinasi Penerimaan di Daerah Tujuan
			Monitoring dan Evaluasi Pasca Pemberangkatan
2	Mengembangkan infrastruktur industri yang memadai, penyediaan wilayah peruntukan industri yang terintegrasi, peningkatan inovasi dengan memberikan insentif untuk adopsi teknologi terbaru dalam proses produksi.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Industri
			Pengembangan Kawasan dan Sentra Industri
			Pembinaan dan Fasilitasi Industri
			Pengembangan SDM dan Kelembagaan Industri
			Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM)
			Penumbuhan dan Pengembangan Wirausaha Industri Baru
			Pengawasan dan Tata Kelola Industri
			Pengumpulan Data dan Informasi Industri
			Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan
		Program Pengendalian Ijin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Perencanaan & Pengelolaan Layanan Perizinan
			Pelayanan Perizinan Usaha Industri
			Pengendalian dan Pengawasan Industri Berizin
			Penegakan Kepatuhan & Penanganan Pelanggaran
			Pembinaan dan Edukasi Pelaku Industri
			Pengembangan Sistem Informasi Perizinan Industri
			Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Pendataan dan Pemutakhiran Data Industri
			Fasilitasi Pelaporan Industri Melalui SIINas
			Validasi dan Pengawasan Data SIINas
			Pengembangan dan Integrasi Sistem Informasi Industri
			Pembinaan dan Edukasi Pelaku Industri
			Koordinasi dan Kolaborasi Antar Instansi
			Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

Tabel 3.6
Dukungan Program dan Kegiatan Terhadap Kegiatan Tematik

No	Prioritas Kota	Program	Aktivitas
1	Pengentasan kemiskinan	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga kerja	Perencanaan dan Persiapan Pelatihan
			Pelaksanaan Pelatihan Kerja
			Sertifikasi Kompetensi
			Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja
			Penempatan dan Layanan Pasca Pelatihan
			Evaluasi dan Pelaporan
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Perencanaan & Pengelolaan Layanan Penempatan
			Pelayanan Antar Kerja (AKAD / Job Matching)
			Fasilitasi Rekrutmen
			Bursa Kerja / Job Fair
			Penempatan Tenaga Kerja Dalam & Luar Negeri
			Layanan Informasi Pasar Kerja (IPK)
			Penguatan Kelembagaan Layanan Penempatan
			Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan
		Program Hubungan Industrial	Pembinaan Hubungan Industrial
			Penguatan Kelembagaan Hubungan Industrial
			Pengupahan
			Penyusunan & Pendaftaran Peraturan Perusahaan (PP) / Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
			Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
			Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
			Hubungan Kerja & Norma Kerja
			Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan
		Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Perencanaan dan Seleksi Calon Transmigran
			Pembekalan Pra-Pemberangkatan
			Pengurusan Administrasi Pemberangkatan
			Fasilitasi Logistik dan Transportasi
			Pendampingan Teknis Selama Pemberangkatan
			Koordinasi Penerimaan di Daerah Tujuan
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Monitoring dan Evaluasi Pasca Pemberangkatan
			Penyusunan Perencanaan Pembangunan Industri
			Pengembangan Kawasan dan Sentra Industri
			Pembinaan dan Fasilitasi Industri
			Pengembangan SDM dan Kelembagaan Industri
			Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM)
			Penumbuhan dan Pengembangan Wirausaha Industri Baru
			Pengawasan dan Tata Kelola Industri
			Pengumpulan Data dan Informasi Industri
			Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

Tabel 3.7
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Anggaran Tematik
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga

No	Program / kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Kebutuhan dana
1	2	3	4
1	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Salatiga	340.070.691
1.1	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Salatiga	340.070.691
1.1.1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Salatiga	340.070.691,00
2	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Salatiga	180.000.000
2.1.	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Salatiga	180.000.000
2.1.1	Job Fair/Bursa Kerja	Salatiga	180.000.000
3	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Salatiga	461.000.000
3.1	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Salatiga	37.000.000
3.1.1	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Salatiga	37.000.000,00
3.2.	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Salatiga	424.000.000
3.2.1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Salatiga	180.000.000,00
3.2.2	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Salatiga	44.000.000,00
3.2.3	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Salatiga	200.000.000,00
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Salatiga	4.770.072.513
4.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Salatiga	10.000.000
4.1.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Salatiga	5.000.000
4.1.2	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Salatiga	5.000.000
4.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Salatiga	3.940.072.513
4.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Salatiga	3.775.191.865
4.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Salatiga	164.880.648,00
4.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Salatiga	36.000.000
4.3.1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Salatiga	36.000.000,00
4.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Salatiga	248.500.000
4.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Salatiga	10.000.000,00
4.4.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Salatiga	28.000.000,00
4.4.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Salatiga	7.000.000,00
4.4.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Salatiga	155.000.000,00
4.4.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Salatiga	5.500.000,00
4.4.6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Salatiga	43.000.000,00
4.4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Salatiga	230.500.000
4.4.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Salatiga	500.000,00
4.4.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Salatiga	90.000.000,00
4.4.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Salatiga	140.000.000,00
4.5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Salatiga	305.000.000
4.5.1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Salatiga	25.000.000,00
4.5.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Salatiga	140.000.000,00
4.5.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Salatiga	30.000.000,00
4.5.4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Salatiga	110.000.000,00
5	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Salatiga	235.000.000
5.1	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Salatiga	235.000.000
5.1.1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Salatiga	35.000.000,00
5.1.2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Salatiga	200.000.000,00
6	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Salatiga	18.000.000
6.1	Penerbitan Izin Usaha Industri (UI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Salatiga	18.000.000

No	Program / kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Kebutuhan dana
1	2	3	4
6.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Salatiga	18.000.000,00
7	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Salatiga	15.000.000
7.1	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Salatiga	15.000.000
7.1.1	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Salatiga	15.000.000,00
8	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Salatiga	55.000.000
8.1	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Salatiga	55.000.000
8.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Salatiga	55.000.000,00
TOTAL ANGGARAN			6.074.143.204

Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun (2027)
dan Prakiraan Maju Tahun (2028)

Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Rencana Tahun n (2027)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun (n+1) 2028	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
-2	-3		-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
URUSAN TENAGA KERJA									
2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang Terlatih	%	Salatiga	0,34	656.333.452	DAU	-	0,36	781.069.095
2.07.03.2.01 Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang terlatih	orang	Salatiga	112	625.333.452	DAU	-	128	749.069.095
2.07.03.2.01.0009 Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	orang	Salatiga	112	625.333.452	DAU	-	128	749.069.095
2.07.03.2.02 Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dibina	%	Salatiga	100	31.000.000	DAU	-	100	32.000.000
2.07.03.2.02.0001 Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	lembaga	Salatiga	27	31.000.000	DAU	-	28	32.000.000
2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kab/Kota	%	Salatiga	71,69	422.444.453	DAU	-	71,91	474.190.941
2.07.04.1.01 Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Pelayanan Antar Kerja	orang	Salatiga	25	58.923.900	DAU	-	25	61.870.095
2.07.04.1.01.0002 Sub Kegiatan Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan Melalui layanan AKAD, AKL dan ULD	orang	Salatiga	50	58.923.900	DAU	-	75	61.870.095
2.07.04.1.03 Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Terlaksananya Job Fair	%	Salatiga	100	326.770.553	DAU	-	100	373.733.346
2.07.04.2.01.0003 Sub Kegiatan Pemeliharaan dan operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Terpeliharanya aplikasi	%	Salatiga	100	27.000.000	DAU	-	100	29.000.000
2.07.04.2.03.0003 Sub Kegiatan Job Fair/ Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan melalui Job Fair/Bursa Kerja	orang	Salatiga	349	302.101.833	DAU	-	379	343.050.505
2.07.04.2.04 Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi CPMI/PMI	%	Salatiga	10,29	35.000.000	DAU	-	10,67	38.000.000
2.07.04.2.04.0001 Sub Kegiatan Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	orang	Salatiga	74	35.000.000	DAU	-	80	38.000.000
2.07.04.3.05 Kegiatan Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga Kerja Asing Yang memiliki izin	%	Salatiga	100	28.000.000	DAU	-	100	30.000.000
2.07.04.3.05.0002 Sub Kegiatan Validasi Pembayaran Dana	Jumlah Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing	SKRD	Salatiga	37	28.000.000	DAU	-	36	30.000.000
Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) untuk Pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi dalam 1 (satu) kabupaten/kota	(DKPTKA) untuk Pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi dalam 1 (satu) kabupaten/kota Yang Divalidasi		Salatiga			DAU	-		
2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Prosentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	Salatiga	94,44	677.716.443	DAU	-	95,17	769.237.099
2.07.05.2.01 Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial	kasus	Salatiga	15	71.371.600	DAU	-	14	78.884.400
2.07.05.2.01.0003 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	laporan	Salatiga	1	71.371.600	DAU	-	1	78.884.400
2.07.05.2.02 Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Pesentase Angka Perselisihan pengusaha-pekerja yang diselesaikan secara Perjanjian Bersama (PB)	%	Salatiga	100	606.344.843	DAU	-	100	690.352.699
2.07.05.2.02.0001 Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial , Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	perkara	Salatiga	15	241.278.104	DAU	-	14	240.217.882
2.07.05.2.02.0004 Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	lembaga	Salatiga	1	88.141.739	DAU	-	1	97.419.817
2.07.05.2.02.0005 Sub Kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	orang	Salatiga	5335	276.925.000	DAU	-	5435	352.715.000

Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Rencana Tahun n (2027)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun (n+1) 2028	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
-2	-3		-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	Salatiga	100	15.583.078.261	DAU	-	100	6.262.727.066
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	%	Salatiga	89,28		DAU	-	89,53	
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	%	Salatiga	75,2		DAU	-	75,5	
1.Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi capaian kinerja	dokumen	Salatiga	1	30.500.000	DAU	-	1	30.500.000
1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	Salatiga	1	5.500.000	DAU	-	1	5.500.000
2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat daerah	Data	Salatiga	2	25.000.000	DAU	-	2	25.000.000
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terbayarnya gaji dan tunjangan bagi PNS serta pengelola keuangan	tahun	Salatiga	1	5.389.471.287	DAU	-	1	5.928.418.416
1.Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	Salatiga	27	4.906.000.000	DAU	-	27	5.396.600.000
2. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen	Salatiga	1	483.471.287	DAU	-	1	531.818.416
3.Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Keamanan Barang Milik daerah pada perangkat daerah	tahun	Salatiga	1	55.000.000	DAU	-	1	60.500.000
1. Sub Kegiatan Pengamanan barang milik daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah	dokumen	Salatiga	1	55.000.000	DAU	-	1	60.500.000
4.Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Ketersediaan logistik dan kebutuhan perkantoran	tahun	Salatiga	1	271.095.000	DAU	-	1	298.204.500
1. Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	Salatiga	1	11.495.000	DAU	-	1	12.644.500
2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	Salatiga	1	38.500.000	DAU	-	1	40.000.000
3. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	Salatiga	1	60.500.000	DAU	-	1	61.000.000
4. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	Salatiga	1	8.800.000	DAU	-	1	9.200.000
5. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	Salatiga	1	-	DAU	-	1	-
6. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	laporan	Salatiga	1	8.800.000	DAU	-	1	9.500.000
7. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	Salatiga	1	220.000.000	DAU	-	1	220.000.000
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	unit	Salatiga	6	9.367.311.975	DAU	-	7	55.000.000
1. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Tersedianya peralatan dan mesin	unit	Salatiga	5	55.000.000	DAU	-	6	55.000.000
2. Sub Kegiatan Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Tersedianya gedung kantor atau bangunan lainnya	unit	Salatiga	1	9.312.311.975	DAU	-	1	-
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa penunjang perkantoran	tahun	Salatiga	1	283.800.000	DAU	-	1	301.180.000
1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	Salatiga	1	1.100.000	DAU	-	1	1.210.000
2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	Salatiga	1	110.000.000	DAU	-	1	110.000.000
3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	Salatiga	1		DAU	-	1	
7.Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Keamanan Barang Milik daerah pada perangkat daerah	tahun	Salatiga	1	520.299.999	DAU	-	1	575.702.566
1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	Salatiga	21	113.300.000	DAU	-	21	124.630.000
2.Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	Salatiga	235	66.000.000	DAU	-	235	67.000.000
3. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	Salatiga	3	286.000.000	DAU	-	3	323.572.566
4.Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	Salatiga	288	54.999.999	DAU	-	288	60.500.000
3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase industri kota salatiga yang berkembang	%	Salatiga	0,88	510.825.404	DAU	-	1,32	580.058.370
3.31.02.2.01 Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan Industri Kota Salatiga	%	Salatiga	33,44	510.825.404	DAU	-	33,59	580.058.370
3.31.02.2.01.0004 Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,Sinkronisasi,danP elaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	dokumen	Salatiga	1	38.000.000	DAU	-	1	40.000.000

Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Rencana Tahun n (2027)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun (n+1) 2028	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
-2	-3		-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
3.31.02.2.01.0005 Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	JumlahDokumenHasilKoordinasi,Sinkronisasi,danPelaksanaanPemberdayaanIndustri dan Peran Serta Masyarakat	dokumen	Salatiga	1	472.825.404	DAU	-	1	540.058.370
3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IJIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN /KOTA	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	Salatiga	23,08	18.454.364	DAU	-	23,5	20.707.028
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	Salatiga	3,53		DAU	-	4,59	
3.31.03.2.01 Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Izin Industri yang diverifikasi	izin	Salatiga	8	18.454.364	DAU	-	8	20.707.028
3.31.03.2.01.0003 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan	dokumen	Salatiga	1	18.454.364	DAU	-	1	20.707.028
3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	%	Salatiga	100	77.026.909	DAU	-	100	86.969.517
3.31.04.2.01 Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Sosialisasi SIINas	%	Salatiga	100	77.026.909	DAU	-	100	86.969.517
3.31.04.2.01.0001 Sub Kegiatan Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	dokumen	Salatiga	1	77.026.909	DAU	-	1	86.969.517
3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Pelaksanaan Proses Transmigrasi	%	Salatiga	60	98.690.727	DAU	-	60	108.504.827
3.32.03.2.01 Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah transmigran yang diberangkatkan ke lokasi transmigrasi	KK	Salatiga	2	98.690.727	DAU	-	2	108.504.827
3.32.03.2.01.0001 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	laporan	Salatiga	1	68.690.727	DAU	-	1	78.504.827
3.32.03.2.01.0005 Sub Kegiatan Penyuluhan transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	KK	Salatiga	90	30.000.000	DAU	-	90	30.000.000